



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP BELANJA DAERAH KOTA BUKITTINGGI

SKRIPSI



AFDHAL AMRAN
1010532089

JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2014

JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ANDALAS

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : **AFDHAL AMRAN**
No. BP : 1010532089
Program Studi : Strata Satu (S-1)
Jurusan : Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan
Judul : **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan
Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja
Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2005-2014**

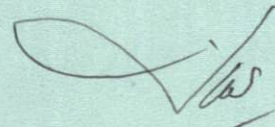
Telah disajikan dan disetujui skripsi ini melalui seminar hasil yang diadakan pada tanggal 06 Oktober 2015 sesuai dengan prosedur, ketentuan, dan kelaziman yang berlaku.

Kepala Program Studi Akuntansi


Padang, 02 November 2015
Pembimbing Skripsi



Verni Juita, SE, M.Com (Adv), Ak, CA
NIP. 197906182002122004



Dra. Nini Syofriyeni, M. Si, Ak
NIP. 196902051994022001

	No Alumni Universitas	AFDHAL AMRAN	No Alumni Fakultas
	<p style="text-align: center;">BIODATA</p> <p>a). Tempat/Tgl Lahir : Bukittinggi/31 Juli 1991 b). Nama Orang Tua : Amran dan Bakhrida c). Fakultas : Ekonomi d). Jurusan : Akuntansi e). No.Bp : 1010532089 f). Tanggal Lulus : 28 Oktober 2015 g). Predikat lulus : Memuaskan h). IPK : 3.05 i). Lama Studi : 5 tahun 3 bulan j). Alamat Orang Tua : Jln. Prof. M. Yamin SH. No. 04, Aur Atas, Bukittinggi, Sumatera Barat</p>		

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2005-2014

Skripsi oleh: Afdhal Amran

Pembimbing: Dra. Nini Syofriyeni, M.Si, Ak

ABSTRACT

From 33 provinces and 471 districts/cities in indonesia, only about 10 percent which have a formal delimitation, one of them is West Sumatera Province which has 12 districts and 7 cities. West Sumatera Province has an income sources and the abundant natural wealth in each area, including bukittinggi city. Therefore, aims of this study are to proof empirically the influence of Regionally Original Income (PAD) and General Allocation Fund (DAU) on the Regional Expense in Bukittinggi.

This study uses secondary data with source is from the Realization Report of the Estimate Income of Regional Expense (APBD) from 2005 until 2014. Method of the sample uses census method by taking the entire population. And the instrument that used result is a multiple regression model.

Result of this study in partially indicates PAD doesn't have a significant impact on regional expense, and DAU have a significant impact on regional expense allocations. and in simultaneous it shows that PAD and DAU have a significant impact on regional expense allocations. Furthermore, the dependence level on regional expense allocation is more dominant Regionally Original Income (PAD) than General Allocation Fund (DAU).

Keywords : *Regionally Original Income (PAD), General Allocation Fund (DAU), Regional Expense*

ABSTRAK


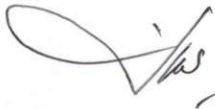
Dari 33 provinsi dan 472 kabupaten/kota di Indonesia, hanya sekitar 10 persen yang mempunyai penetapan batas wilayah yang resmi salah satunya Provinsi Sumatera Barat yang memiliki sumber-sumber pendapatan dan kekayaan alam yang melimpah di setiap daerahnya, termasuk kota Bukittinggi. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah di Kota Bukittinggi.

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam kurun waktu tahun 2005 hingga 2014. Model pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode sensus dengan mengambil seluruh populasi sementara model analisis yang digunakan yakni Model Analisis Regresi Linier Berganda.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa secara parsial menunjukkan PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah, sedangkan DAU berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Secara simultan kedua variabel ini menunjukkan pengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Dan jika dilihat lebih lanjut tingkat ketergantungan alokasi Belanja Daerah lebih dominan PAD daripada DAU.

Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Daerah

Skripsi telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 06 Oktober 2015, dengan penguji :

Tanda Tangan	1. 	2. 
	Nama Terang Denny Yohana, SE, M.Si, Ak	Dra. Nini Syofriyeni, M.Si, Ak

Mengetahui :

Ketua Jurusan Akuntansi: **Dr. Efa Yonnedi, SE, MPPM, Ak**
NIP. 197205021996021001

Tandatangan

Alumnus telah mendaftar ke fakultas dan telah mendapat Nomor Alumnus :

	Petugas Fakultas / Universitas	
No Alumni Fakultas	Nama:	Tanda tangan:
No Alumni Universitas	Nama:	Tanda tangan:

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2005-2014.

Merupakan hasil karya saya sendiri, dan tidak terdapat sebagian atau keseluruhan dari tulisan yang memuat kalimat, ide, gagasan, atau pendapat yang berasal dari sumber lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya. Adapun bagian-bagian yang bersumber dari karya orang lain telah mencantumkan sumbernya sesuai dengan norma, etika, dan kaidah penulisan ilmiah. Apabila dikemudian hari ditemukan *plagiat* dalam skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Padang, 02 November 2015
Yang membuat pernyataan



Afdhal Amran
Bp: 1010532089

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa menyertai, membimbing, memberikan kesehatan, kekuatan, ketenangan, dan keyakinan bagi penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi yang berjudul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2005-2014”** ini diajukan sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Program S-1 Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak, skripsi ini tidak dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Kedua orang tua, Papa dan Mama tercinta yang menjadi alasan penulis untuk tetap semangat menggapai cita-cita. Terimakasih atas nasehat, doa, kesabaran, pengorbanan yang tak terhingga baik moril maupun materil selama penulis menuntut ilmu dan kasih sayang sepanjang masa yang tidak akan dapat penulis balas. Mimpi penulis bisa membuat Papa dan Mama bangga serta bisa membalas setitik dari selautan kasih sayang dan jasa yang telah Papa dan Mama berikan. Terimakasih pa, ma, *thanks for everything, I Love Both of You So Much.*

2. Terimakasih kepada kakak satu-satunya, Aulia Amran, S.Kom yang tak henti-hentinya terus memberikan semangat, doa, juga dukungan untuk penulis. Alhamdulillah sekarang kita sama-sama bergelar sarjana. Lah sarjana anak ama jo apa kaduonyo. Buat si cantik Kiandra yang jadi penyemangat bagi penulis, selalu menghibur penulis selama ini, *pokoknya cayang beudlah sama si keponakan tersayang ini. Semoga makin pintar, makin cantik, dan jadi kebanggaan ayah bunda yaa*, serta untuk seluruh keluarga besar yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. ☺
3. Bapak Prof. Tafdil Husni, SE, MA, Ak, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
4. Bapak Dr. Efa Yonnedi, SE. MPPM. Ak, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas dan Bapak Firdaus, SE, M.Si, Ak, selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
5. Ibu Verni Juita SE, M.Com (adv), Ak, CA selaku Ketua Program Studi Akuntansi Strata-1 yang telah memberikan kemudahan bagi penulis untuk melaksanakan seminar hasil skripsi. Terimakasih untuk saran dan motivasi yang ibuk berikan dalam menghadapi Ujian Kompre.
6. Bapak Fauzan Misra, SE, M.Sc, Ak, selaku pembimbing akademik yang telah memberikan masukan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan masalah akademik selama masa perkuliahan. Maafin

afdhal pak karna selalu membuat bapak kesal gara-gara IP dhal yang sering turun-naik.

7. Ibu Dra. Nini Syofriyeni, M.Si, Ak, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran serta dengan sabar membimbing penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan. terimakasih atas segala motivasi yang telah diberikan selama bimbingan. Selain itu, penulis mengucapkan maaf atas segala sikap perbuatan, tutur kata yang kurang berkenan selama proses bimbingan penulisan skripsi ini. Maaf kalau afdhal semasa bimbingan sering maksa ibuk biar skripsi ini bisa segera di-seminarkan hasilnya.
8. Ibu Denny Yohana. S.E. M.Si, Ak, selaku penelaah yang telah memberikan masukan yang bermanfaat bagi penulis dalam penulisan skripsi. Juga terimakasih atas waktu yang ibuk sediakan saat beberapa hari menjelang kompre ibuk membantu penulis, mengajarkan penulis dan mengobati kecemasan penulis dalam menghadapi ujian Komprehensif, dan alhamdulillah one shoot buk komprenya. ☺
9. Ibu Dr. Yurniwati, SE, M.Si, Ak, dan Ibu Dra. Warnida, MM, Ak selaku dosen penguji pada Ujian Komprehensif yang telah meluluskan penulis hingga memperoleh gelar Sarjana Ekonomi. Terimakasih atas kepercayaannya untuk melepas penulis menjadi seorang sarjana.
10. Seluruh Dosen Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, terimakasih atas ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga yang telah Bapak/Ibu berikan kepada penulis.

11. Pihak Biro Jurusan Akuntansi, Da Ari dan Uni Eva serta pegawai ICT dan dekanat, yang telah memberikan banyak bantuan dalam kelancaran urusan administrasi akademis penulis.
12. Pemerintah Kota Bukittinggi melalui Dinas Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah (DPKAD), terimakasih telah memberikan kemudahan dalam proses penelitian dan permintaan data, serta memberikan pengalaman menarik kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
13. Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bukittinggi, yang telah bersedia memberikan kemudahan dalam proses penelitian, permintaan data dan memberikan kebutuhan informasi pendukung lainnya terkait penyusunan skripsi ini.
14. Sahabat dan teman-teman yang telah menemani perjuangan penulis selama ini, Terimakasih telah memberikan banyak pelajaran hidup, menemani suka-duka, tawa, tangis bersama dibawah hujan rinai patuih angin angek garang bersama penulis.
15. Terimakasih teman-teman KKN Nagari Sungai Balantiak 2013 Ria, Ucay, Rifa, Yatno yang selalu mengingatkan, memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi. Roza, Della, Naila, Intan, Ilo, Yondra, Ihsan, Fajri, Bagus, Rio, Nando, Rafiqi, Zul, dan kawan lainnya, KKN mempertemukan kita, pengalaman kurang lebih 2 bulan yang tak terlupakan sehingga menjalin erat persahabatan yang berlanjut sampai sekarang walaupun sudah berjauhan, terimakasih telah memberikan semangat dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini. Ingin rasanya

mengulang kembali kkn bersama dengan kalian, semoga pengalaman tersebut bisa jadi kenangan yang tak terlupakan buat kita semuanya. Kepada Bapak Jorong dan Bapak Wali Nagari Sungai Balantiak yang telah menerima, membantu dan membimbing kami selama mengikuti kegiatan KKN.

16. Kepada Uni Riza dan Uda Inal di rumah tempat tinggal ketika KKN terimakasih telah memberikan bantuan selama ini. Saran, Motivasi yang terus uni dan uda berikan semenjak KKN sampai sekarang sangat berguna sekali. Terimakasih uni, uda. Alhamdulillah sekarang dhal lah meraih gelar SE uni, gelar yang sama dengan yang uni miliki.
17. Untuk teman-teman Akuntansi angkatan 2010 lainnya, Risad, Walid, Aat, Eko, Senja, Wisnu, Rizki, Dini, Ai, Firda, Ojik, Meri, Nisa, Tia, Fani, Anne, Nela, Citut, dan teman-teman lainnya yang tidak dapat disebutkan satu-persatu Yang udah ngajak belajar bareng, makan bareng, bikin tugas, ngasih motivasi, cerita-cerita sharing pengalaman, ketawa-ketawa, maupun yang meminjamkan perangkat-perangkat ujian yang juga tidak bisa disebutkan satu persatu.terimakasih atas segala hal yang diberikan kepada penulis, terimakasih telah menemani penulis selama masa perkuliahan.
18. Terimakasih untuk teman-teman kost-an "*the Panda's*" Camaik, Erik, Fauzan, Sukri, Metriadi, Ridho, Andre, Fitrah, Diaz, Khairul, Fandi, yang telah memberikan semangat dan sumbangan pemikiran selama perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini. Sukses untuk kita semua, Semoga kita bisa mengejar cita-cita dan impian kita masing-masing,

khusus bagi yang masih “semangat-semangatnya” kuliah semoga lekas sarjana. *Next will be Yours.*

19. Terimakasih untuk konco-konco Akuntansi SE-angkatan SE-perfutsalan, Fahri, Rozi, Rizal, Acim, Diki, Bayan, Iqbal, Vero, Angga, Yopi, Ade, Harqi, Yudha, Roni, Rianda, SEMangat kawan, SEMoga SEMua SEgera S.E Secepatnya, Aamiin. Futsal lai Futsal.
20. Untuk teman-teman Manajemen 2010, Edo, Novri, Imam, Andra, Adi, Ihsan, Tito, Abdul, Rudi, Eka, Rendi, Tama, Putra, Aulia, Dinda, Insan, Veni, Ayu, Uut, Afifi dkk, terimakasih atas kebersamaannya, walaupun telah banyak yang wisuda duluan tetap jaga komunikasi ya. Semoga kita sukses semua. Aamiin.
21. Untuk teman-teman yang belajar kompre bareng, Ida, Gita, Jeje, Nelda, Nelli, Nova, Dini, Kak Nia, dan teman-teman lain, terimakasih telah membagi wawasan dan ilmunya kepada penulis selama persiapan menuju kompre, terimakasih atas dukungan, semangat, saran dan motivasi yang telah diberikan. Gelar yang pantas kita dapat berkat perjuangan dan kerja keras serta do'a yang kita lakukan selama ini. Semoga Allah SWT membalas kebaikan semuanya dan sukses kedepannya untuk kita semua, ☺ Amin-ya-Rabbal-amin.
22. Terimakasih kepada Dilla yang tetap memberikan semangat dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini secepatnya.
23. Semua alumni SDN 02 Bukittinggi, terimakasih atas motivasi yang terus diberikan kepada penulis, walaupun sudah terpisah begitu lama tapi tetap memberi semangat, dukungan dan saran kepada penulis,

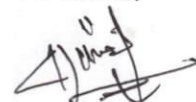
Alhamdulillah penulis sekarang juga punya gelar sarjana yang juga telah kalian miliki. Ditunggu Reuniannya teman.

24. Semua sahabat angkatan 2007 SMAN 3 Bukittinggi dan sahabat seperjuangan lainnya terimakasih telah memberi semangat, mendukung serta motivasi untuk menyelesaikan studi. Semua akan wisuda pada waktunya.
25. Uda-uda, uni-uni, adik-adik keluarga besar Akuntansi yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah membagi cerita pengalaman selama masa perkuliahan, juga mengajarkan penulis untuk selalu belajar serta memberikan semangat dan doa.
26. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata, tiada kata indah yang pantas terucapkan dan tiada sesuatu yang pantas penulis berikan untuk membalas budi baik kecuali hanya doa, semoga segala bantuan dan amal baik yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Penulis menyadari sepenuhnya skripsi ini masih perlu penyempurnaan. Semua ini karena keterbatasan pengetahuan penulis, maka saran dan kritik dari para pembaca sangat diharapkan.

Padang, 11 November 2015

Penulis,



Afdhal Amran

1010532089

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	i
ABSTRAK	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GRAFIK	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xvii

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Batasan Masalah	9
1.3. Rumusan Masalah	10
1.4. Tujuan Penelitian	11
1.5. Manfaat Penelitian	12
1.6. Sistematika Penulisan	13

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Otonomi Daerah	15
2.1.1 Desentralisasi	17
2.1.1.1 Desentralisasi Pembangunan	17
2.1.1.2 Desentralisasi Fiskal	18
2.1.2 Hubungan Pusat dan Daerah	19
2.2 Anggaran Daerah	22
2.3 Alokasi Anggaran Belanja Daerah	25
2.4 Pendapatan Asli Daerah	29
2.5 Dana Alokasi Umum	33
2.6 Flypaper Effect	35
2.7 Review Penelitian Terdahulu	37

2.8 Kerangka Pemikiran	39
2.9 Hipotesis	40
2.9.1 Pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah	40
2.9.2 Pengaruh DAU terhadap Belanja Daerah	42
2.9.3 Pengaruh PAD dan DAU terhadap Belanja Daerah	44

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian	47
3.2 Subjek Penelitian	48
3.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	49
3.3.1 Variabel Penelitian	49
3.3.2 Definisi Operasional	50
3.4 Jenis dan Sumber Data	51
3.5 Metode Pengumpulan Data	51
3.6 Metode Analisa Data	52
3.6.1 Statistik Deskriptif	53
3.6.2 Uji Asumsi Klasik	53
3.6.2.1 Uji Normalitas	53
3.6.2.2 Uji Multikoleneartitas	54
3.5.2.3 Uji Autokorelasi	54
3.5.2.4 Uji Heteroskedstisitas	55
3.6.3 Pengujian Hipotesis	56
3.6.3.1 Uji Signifikan Parameter Individual (Uji T)	56
3.6.3.2 Uji Signifikan Parameter Simultan (Uji F)	56
3.6.3.3 Koefisien Determinasi (R^2)	57

BAB IV. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Data Penelitian	60
4.1.1 Gambaran Umum	60
4.1.1.1 Kondisi Geografis dan Iklim	60
4.1.1.2 Kondisi Demografi	61
4.1.2 APBD Kota Bukittinggi	62

4.1.3 Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi	63
4.1.4 Dana Alokasi Umum Kota Bukittinggi	66
4.1.5 Belanja Daerah Kota Bukittinggi	67
4.2 Analisis Data	68
4.2.1 Statistik Deskriptif	68
4.2.2 Uji Asumsi Klasik	70
4.2.2.1 Uji Normalitas	70
4.2.2.2 Uji Multikolinearitas	71
4.2.2.3 Uji Autokorelasi	72
4.2.2.4 Uji Heteroskedastisitas	73
4.2.3 Pengujian Hipotesis	74
4.2.3.1 Uji Statistik T	75
4.2.3.2 Uji Statistik F	76
4.2.3.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)	78
4.2.4 Hasil Uji Regresi	79

BAB V. PENUTUP

5.1 Data Penelitian	88
5.2 Keterbatasan Penelitian	89
5.3 Saran	90

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 4.2	Penyebaran Penduduk Kota Bukittinggi per Kecamatan dan Jumlah per Jenis Kelamin Tahun 2013	61
Tabel 4.2	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bukittinggi Tahun 2005 – 2014	64
Tabel 4.3	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bukittinggi Tahun 2005 - 2014	65
Tabel 4.4	Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) Kota Bukittinggi Tahun 2005 – 2014	66
Tabel 4.5	Realisasi Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2005 - 2014	67
Tabel 4.6	Statistik Deskriptif	68
Tabel 4.7	Uji Multikolinearitas	72
Tabel 4.8	Uji Autokorelasi	72
Tabel 4.9	Uji T	75
Tabel 4.10	Uji F	77
Tabel 4.11	Uji Koefisien Determinasi (R^2)	79
Tabel 4.12	Uji Regresi Berganda	80

DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1 Uji Normalitas	70
Grafik 4.2 Uji Heteroskedastisitas	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Penelitian	39
--	----

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Suatu negara dengan wilayah yang luas membutuhkan suatu sistem pemerintahan (*governance*) yang baik. Sistem ini sangat diperlukan setidaknya oleh dua hal : pertama sebagai alat untuk melaksanakan berbagai pelayanan publik di berbagai daerah, kedua sebagai alat bagi masyarakat setempat untuk dapat berperan serta aktif dalam menentukan arah dan cara mengembangkan taraf hidupnya sendiri selaras dengan peluang dan tantangan yang dihadapi dalam koridor kepentingan - kepentingan nasional.

Demi tercapainya tujuan tersebut ada banyak hal yang harus dilakukan, salah satunya adalah dengan diselenggarakannya otonomi daerah. Pertimbangan yang mendasari perlunya diselenggarakan otonomi daerah adalah perkembangan kondisi di dalam dan di luar negeri. Kondisi di dalam negeri mengindikasikan bahwa rakyat menghendaki keterbukaan dan kemandirian. Di lain pihak keadaan di luar negeri menunjukkan semakin maraknya globalisasi yang menuntut daya saing tiap negara, termasuk pemerintah daerahnya.

Seiring dengan adanya perkembangan zaman / globalisasi tersebut, Indonesia pun mengalami perkembangan yang pesat. Dengan perkembangan tersebut, maka muncullah era baru dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Salah satu ketetapan MPR yaitu Tap MPR No. XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian

dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia “Merupakan landasan hukum bagi dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai penyelenggara Otonomi Daerah”.

Otonomi Daerah ditandai dengan dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah sebagai penyelenggara Otonomi daerah, yang telah diperbaharui menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai penyelenggara Otonomi daerah.

Kebijakan pemerintah Indonesia tentang Otonomi Daerah yang mulai dilaksanakan secara efektif pada tanggal 1 Januari 2001 merupakan kebijakan yang dipandang sangat demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi pemerintah yang sesungguhnya. Dengan diberlakukannya otonomi daerah maka pelaksanaan pembangunan daerah sangat tergantung kepada kemampuan daerah di dalam memanfaatkan semua potensi yang dimiliki daerah, baik potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Daerah otonom harus mempunyai beberapa kemampuan agar dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya, kemampuan itu antara lain kemampuan keuangan, kemampuan aparatur, kemampuan ekonomi dan sebagainya (Syamsi, 1994).

Semenjak awal kemerdekaan sampai sekarang telah terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kebijakan otonomi daerah. Salah satunya UU No. 5 Tahun 1974 yang menganut prinsip otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab. Berikutnya di bawah UU No. 22 Tahun 1999 dianut prinsip otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Menurut Kuncoro (2004) perbedaan antara otonomi daerah pada UU No. 5 Tahun 1974 dengan No. 22 Tahun 1999 adalah pada UU No. 5 Tahun 1974 otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sedangkan UU No. 22 Tahun 1999 otonomi daerah merupakan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, hal ini menerangkan bahwa Undang-Undang lama menganut unsur kewajiban, sementara Undang-Undang baru tidak menyebutkan otonomi daerah sebagai hak. Undang-Undang baru lebih menekankan bahwa otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dengan menekankan pada pentingnya prinsip aspirasi masyarakat.

Fenomena umum yang dihadapi oleh sebagian besar pemerintahan daerah di Indonesia di bidang keuangan daerah adalah relatif kecilnya peranan (kontribusi) Pendapatan Asli Daerah (PAD) didalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Akibatnya belanja daerah tidak mampu dibiayai langsung melalui hasil kekayaan daerah yang diwujudkan dalam

Pendapatan Asli Daerah (PAD) melainkan dibiayai oleh transfer dari Pemerintah Pusat.

Dengan kata lain peranan / kontribusi penerimaan yang berasal dari Pemerintah pusat dalam bentuk sumbangan dan bantuan, bagi hasil pajak dan bukan pajak, mendominasi susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berlakunya Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah membawa perubahan mendasar pada sistem dan mekanisme pengelolaan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang ini menegaskan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat akan mentransferkan dana perimbangan kepada Pemerintah Daerah. Dana perimbangan tersebut terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bagian daerah dari Bagi Hasil Pajak Pusat. Tujuan dari transfer ini adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar pemerintah dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum diseluruh negeri. Adanya transfer dana ini bagi Pemerintah Daerah merupakan sumber pendanaan dalam melaksanakan kewenangannya, sedangkan kekurangan pendanaan diharapkan dapat digali melalui sumber pendanaan sendiri yaitu Pendapatan Asli Daerah (Sidik, 2002).

Adanya dana transfer tersebut berimplikasi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yaitu pada pos penerimaan, sebagai konsekuensinya adalah bertambah besarnya jumlah penerimaan daerah. Perubahan jumlah penerimaan daerah yang cukup besar tersebut harus diikuti dengan pengelolaan

keuangan daerah yang efektif dan efisien dan disertai dengan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.

UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah juga dapat memberikan spirit bagi Pemerintah Daerah untuk memberdayakan sumber ekonomi yang ada secara mandiri, ekonomis, efisien, dan efektif. Misi utama Undang-Undang tersebut bukan hanya pelimpahan kewenangan pembiayaan, tetapi dimaksudkan agar penataan sistem pengelolaan keuangan lebih baik sehingga diharapkan kualitas pelayanan kepada masyarakat semakin baik dan kesejahteraan masyarakat meningkat.

Semangat desentralisasi, demokrasi, transparansi dan akuntabilitas menjadi sangat dominan dalam proses penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan keuangan daerah yang sehat sebagai salah satu upaya mewujudkan *Good Governance*. Oleh karenanya dibutuhkan laporan keuangan yang handal dan dapat dipercaya agar dapat memberikan informasi sumber daya keuangan daerah guna mengukur sejauh mana prestasi pengelolaan sumber daya keuangan Pemerintah daerah yang bersangkutan sesuai dinamika dan tuntutan masyarakat (publik).

Dalam penggunaan semua dana perimbangan tersebut Pemerintah Pusat menyerahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah harus menggunakan transfer dari Pemerintah Pusat tersebut secara efektif dan efisien dalam rangka peningkatan standar pelayanan publik minimum serta disajikan secara transparan dan akuntabel. Akan tetapi, pada prakteknya transfer dari

Pemerintah Pusat sering kali dijadikan sumber dana utama oleh Pemerintah Daerah untuk membiayai operasi utama sehari-hari, yang oleh Pemerintah Daerah dilaporkan, diperhitungkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Semakin tinggi derajat kemandirian suatu daerah menunjukkan bahwa daerah tersebut semakin mampu membiayai pengeluarannya sendiri tanpa bantuan dari Pemerintah Pusat. Apabila dipadukan dengan derajat desentralisasi fiskal yang digunakan untuk melihat kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan daerah secara keseluruhan, maka akan terlihat kinerja keuangan daerah secara utuh.

Secara umum, semakin tinggi kontribusi Pendapatan Asli Daerah dan semakin tinggi kemampuan daerah untuk membiayai pengeluarannya sendiri akan menunjukkan kinerja keuangan daerah yang positif. Dalam hal ini, kinerja keuangan positif dapat diartikan sebagai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai kebutuhan daerah dan mendukung pelaksanaan otonomi daerah di daerah tersebut. Dalam hal ini Pendapatan Asli Daerah, khususnya berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang saat ini merupakan salah satu sumber penerimaan yang menjadi tumpuan daerah karena 90% diantaranya adalah menjadi hak daerah.

Melihat tren dan fenomena tersebut, Pemerintah daerah sewajarnya mulai memikirkan dan bertindak guna menggali potensi penerimaan daerah yang lain, Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah, yang memberikan peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya termasuk obyek pajak baru dengan catatan sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Tindakan ini merupakan sebuah konsekuensi atas ditetapkannya Undang-Undang mengenai otonomi daerah yang menyebabkan pemerintah daerah harus dapat mengurangi ketergantungan anggaran dari Pemerintah Pusat dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU).

Dana Alokasi Umum sendiri merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Peranan Dana Alokasi Umum terletak pada kemampuannya untuk menciptakan pemerataan berdasarkan pertimbangan atas potensi fiskal dan kebutuhan nyata dari masing-masing daerah (Undang-Undang No. 33 Tahun 2004).

Permasalahan Dana Alokasi Umum terletak pada perbedaan cara pandang antara pusat dan daerah tentang Dana Alokasi Umum. Bagi pusat, Dana Alokasi Umum dijadikan instrument *horizontal imbalance* untuk pemerataan atau mengisi *fiscal gap*. Bagi daerah, Dana Alokasi Umum dimaksudkan untuk mendukung kecukupan.

Permasalahan timbul ketika daerah meminta Dana Alokasi Umum sesuai kebutuhannya. Di sisi lain, alokasi Dana Alokasi Umum berdasarkan kebutuhan daerah belum bisa dilakukan karena dasar perhitungan *fiscal needs* tidak

memadai, Ditambah total pengeluaran anggaran khususnya APBD belum mencerminkan kebutuhan sesungguhnya dan cenderung tidak efisien.

Warsito (2007) mengatakan bahwa Belanja Daerah dirinci menurut urusan Pemerintah Daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja. Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Provinsi atau Kabupaten/Kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Selain dari permasalahan di atas, batas wilayah yang jelas antar daerah merupakan indikator yang dapat mempengaruhi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum. Saile (2009) menyatakan bahwa dari 33 provinsi dan 471 kabupaten/kota di Indonesia, hanya sekitar 10 persen yang mempunyai penetapan batas wilayah yang resmi. Penentuan batas wilayah sangatlah penting, sebab dengan adanya batas wilayah antar daerah akan dapat memaksimalkan potensi daerah yang dimilikinya. Adanya batas wilayah yang resmi akan diketahui sejauh mana batas status hukum, kepadatan penduduk, tanggung jawab pemerintahan, perpajakan, luas area untuk menghitung potensi sumber daya, hingga dana perimbangan daerah yang pada akhirnya berpengaruh

pada berapa besar pendapatan ataupun pengeluaran yang terjadi pada daerah tersebut.

Beberapa kajian mengenai pelaksanaan desentralisasi di Indonesia sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, antara lain Syukri dan Halim (2003) yang meneliti di Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali, Prakosa (2004) yang meneliti di DIY dan Jawa Tengah, Maemunah (2006) yang meneliti di Sumatra, Sari dan Yahya (2009) yang meneliti di 30 provinsi di Indonesia, serta Rahmawati (2010) yang meneliti di Kabupaten/Kota Jawa Tengah, para peneliti tersebut menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah di berbagai kabupaten/kota yang telah disebutkan diatas. Dari hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa PAD dan DAU memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja daerah, selain itu juga diperoleh hasil bahwa Pemerintah Daerah mempunyai kecendrungan untuk bergantung pada Dana Alokasi Umum daripada mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah-nya sendiri.

Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana pengaruh sebenarnya PAD dan DAU terhadap Belanja Daerah di Kota Bukittinggi, apakah PAD dan DAU memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja daerah Kota Bukittinggi, dengan itu peneliti mengambil judul penelitian tentang : **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Daerah di Era - Otonomi Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2005-2014)”**.

1.2 Batasan Masalah

Agar dapat terfokus dalam pembahasannya maka penelitian ini dibatasi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Belanja Daerah di Kota Bukittinggi Tahun 2005-2014.

Data yang digunakan yaitu laporan realisasi APBD, PAD, DAU dan Belanja Daerah tahun anggaran 2005-2014, hal ini dilakukan berdasarkan ketersediaan data yang ada. Data dalam pembahasan skripsi ini dibatasi pada;

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bukittinggi pada rentang waktu 2005-2014.
2. Dana Alokasi Umum (DAU) Kota Bukittinggi pada rentang waktu 2005-2014.
3. Belanja Daerah Kota Bukittinggi pada rentang waktu 2005-2014.

1.3 Perumusan Masalah

Pada masa pemerintahan Orde Baru, Indonesia memakai sistem terpusat, dimana segala sesuatu diputuskan dan ditentukan oleh pemerintah pusat, lalu daerah-daerah wajib patuh dan tunduk pada pemerintah pusat, sehingga menyebabkan perkembangan daerah sangat tidak merata. Oleh karena itu pada masa Reformasi bergulir, dijalankan sistem otonomi daerah dimana daerah berhak mengatur daerahnya sendiri dengan batasan-batasan tertentu.

Pemerintah Daerah diharapkan mampu mencari sumber dana sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk membantu pembiayaan pada Belanja Daerah. Di samping hal itu sesuai dengan amanat UU No 32 Tahun 2004

dan UU No. 33 Tahun 2004, disebutkan bahwa Pemerintah Pusat wajib menjaga perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan oleh karena itu - Pemerintah Pusat memberikan transfer kepada Pemerintah Daerah berupa Dana Alokasi Umum (DAU) untuk membantu membiayai pembangunan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara individual berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah di Kota Bukittinggi?
2. Apakah besarnya Dana Alokasi Umum (DAU) secara individual berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah Kota Bukittinggi?
3. Apakah besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) secara serempak mempunyai pengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah Kota Bukittinggi?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap belanja Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi.
2. Untuk mengetahui apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap belanja Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi.
3. Untuk mengetahui apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) secara serempak mempunyai pengaruh terhadap Belanja Daerah Kota Bukittinggi?

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dalam melakukan penelitian ini adalah :

1.5.1. Bagi penulis.

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan cakrawala berfikir dalam hal pengembangan wawasan yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan pengaruhnya terhadap Belanja Daerah serta sebagai ajang ilmiah dalam menerapkan berbagai teori yang diperoleh selama perkuliahan dan membandingkannya dengan kenyataan yang ada. Penelitian ini juga diharapkan mampu menambah wawasan keilmuan penulis yaitu sebagai pengalaman dan pembelajaran bagi penulis dalam merancang penelitian-penelitian selanjutnya.

1.5.2 Bagi Pemerintah.

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah daerah untuk memanfaatkan pendapatan asli daerah dan dana transfer dari pemerintah pusat secara proporsional dan dapat disajikan secara transparan sehingga dapat terwujud *good governance*.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah daerah Untuk dapat mengetahui upaya-upaya yang harus dilakukan pemerintah daerah agar pemungutan pajak dapat terlaksana lebih efektif dan efisien sehingga akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Bukittinggi.

- c. Sebagai pedoman atau acuan untuk meningkatkan pelayanan pajak kepada masyarakat.

1.5.3 Bagi Pembaca dan Almamater.

Semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi pembaca dalam rangka pemenuhan informasi dan referensi atau bahan kajian dalam menambah khasanah ilmu pengetahuan terutama yang terkait dengan penerimaan daerah dan belanja daerah, serta sebagai kewajiban bagi masyarakat agar dapat meningkatkan kesadarannya dalam membayar pajak.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari sub-sub bab yang merupakan satu kesatuan sebagai kerangka pemahaman masalah, dengan urutan sebagai berikut :

- **Bab I - Pendahuluan**

Bab ini membahas apa saja yang menjadi latar belakang penulis untuk mengadakan penelitian ini, serta membahas rumusan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

- **Bab II - Landasan Teori**

Pada bab ini akan dibahas landasan teoritis penulis dalam mengemukakan permasalahan. Teori – teori yang melandasi penelitian dan menjadi dasar acuan teori untuk menganalisis dalam penelitian serta menjelaskan penelitian terdahulu yang terkait, menggambarkan kerangka teori dan menarik hipotesis.

- **Bab III - Metodologi Penelitian**

Pada bab ini akan dijelaskan tentang populasi dan pemilihan sampel, data dan sumber data, identifikasi variabel dan pengukuran, kerangka hubungan variabel dependen dan independen dan metode analisa data.

- **Bab IV – Hasil dan Pembahasan**

Bab ini akan menguraikan deskriptif objek penelitian dan analisisnya yang hasilnya penulis sajikan untuk mengambil kesimpulan dan memberikan masukan sebagai saran-saran.

- **Bab V – Kesimpulan dan Saran**

Bab ini berisi kesimpulan dan hasil analisa data serta saran-saran yang dianggap perlu dan berguna bagi penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada tinjauan pustaka ini akan dibahas mengenai teori-teori yang melandasi penelitian dan menjadi dasar acuan teori untuk menganalisis dalam penelitian serta menjelaskan penelitian terdahulu yang terkait, menggambarkan kerangka teori dan menarik hipotesis.

2.1 Otonomi Daerah

Otonomi daerah diartikan secara umum adalah sebagai pemberian kewenangan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. UU No. 22 Tahun 1999 merupakan titik awal pelaksanaan otonomi daerah oleh sebab itu pemerintah pusat menyerahkan sebagian kewenangan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar dalam pelayanan umum kepada masyarakat setempat. Untuk mendorong proses desentralisasi yang berkesinambungan telah diwujudkan melalui diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No 25 Tahun 1999 serta regulasi pelaksanaan berupa Peraturan Pemerintah No. 104 sampai dengan Peraturan Pemerintah No. 110 Tahun 2000 yang berlaku efektif 1 Januari 2001.

Hal yang mendasar dalam UU ini adalah adanya kebijakan publik yang kuat untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, pengembangan prakarsa dan kreativitas, peningkatan peran serta masyarakat dan peningkatan manajemen pengelolaan dana daerah.

Arahan yang diberikan oleh undang-undang ini sudah sangat baik. Namun apakah ini dapat mewujudkan pemerintahan daerah otonom yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel. Hasil yang diinginkan terkait dengan ketaatan penerapan dan kesesuaian isi pokok-pokok aturan dengan kondisi daerah otonom antara lain sebagai berikut:

1. Di bidang Pendapatan, UU No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah sebagai pengganti UU. No. 18 Tahun 1997 (sebelum otonomi) sekaligus dengan Peraturan Pemerintah (PP). No. 65 dan 66 Tahun 2000 sebagai peraturan pelaksana apakah mampu mendorong daerah mengoptimalkan semua potensi dan memberi kewenangan yang lebih luas bagi daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
2. Di bidang Belanja, Peraturan Pemerintah No. 104 s.d 110 merupakan regulasi pengelolaan belanja daerah. Apakah regulasi ini sebagai peraturan pelaksana mampu meningkatkan kinerja keuangan daerah dalam bentuk pencapaian efisiensi dan efektifitas belanja daerah.

Hubungan keuangan pusat dan daerah yang berlaku sejak pemerintah orde baru hingga diberlakukannya otonomi daerah menyebabkan relatif kecilnya peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dengan kata lain kontribusi penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah pusat dalam bentuk dana bagi hasil pajak dan bukan pajak, sumbangan dan bantuan mendominasi penerimaan APBD. Sumber-sumber penerimaan yang relatif besar pada umumnya dikelola oleh pemerintah daerah.

Pola hubungan pusat dan daerah yang seperti ini membuat pemerintah daerah sangat tergantung pada pemerintah pusat. Pada APBN tahun 1990-an menunjukkan bahwa struktur penerimaan Pemerintah Daerah (PEMDA) didominasi oleh transfer pemerintah pusat, baik dalam bentuk bantuan maupun sumbangan.

2.1.1 Desentralisasi

Desentralisasi diartikan sebagai pelimpahan kewenangan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang ada dalam wilayahnya. Istilah lain dari desentralisasi adalah otonomi, yang berarti penyelenggaraan urusan sendiri dan menolak intervensi pemerintah pusat untuk semua kewenangan yang sudah diserahkan pada daerah.

2.1.1.1 Desentralisasi Pembangunan

Otonomi daerah menurut UU No. 22 Tahun 1999 meliputi dua aspek, yaitu desentralisasi pembangunan dan desentralisasi fiskal. Dalam desentralisasi pembangunan pengertian otonomi daerah adalah pelimpahan wewenang pengelolaan pembangunan lebih banyak kepada pemerintah daerah terutama kabupaten dan kota. Sedangkan kewenangan pemerintah pusat dibatasi hanya pada 5 sektor saja, yaitu pertahanan dan keamanan, politik luar negeri, fiskal dan moneter, peradilan dan agama. Sedangkan provinsi diberikan otonomi terbatas dalam pengelolaan pembangunan yang bersifat lintas kabupaten dan kota yang meliputi sektor perkebunan, perhubungan, pekerjaan umum dan kehutanan. Menurut UU No. 22 Tahun 1999 otonomi daerah lebih bersifat *administrative decentralization* yang menekankan pada *delegesi of authority* dengan demikian

otonomi daerah tidaklah memberikan kebebasan mutlak kepada daerah, tetapi kewenangan yang terbatas (*discreation at the margin*) dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

2.1.1.2 Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal sangat erat kaitannya dengan pengertian desentralisasi. Menurut Davey (2003) desentralisasi fiskal adalah pembagian pendapatan dan belanja negara antar tingkatan pemerintahan dan keleluasaan yang diberikan kepada pemerintah daerah dan regional untuk menetapkan anggaran dengan cara membebaskan pajak dan retribusi serta alokasi sumber daya. Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa desentralisasi fiskal adalah bagian dari sistem desentralisasi dan merupakan penyerahan kewenangan fiskal kepada daerah otonom, antara lain :

1. Kewenangan perpajakan (*Local Taxing Power*).
2. Keleluasaan untuk belanja (*Expenditure Assignment*).
3. Perencanaan, Penetapan, dan Pelaksanaan Anggaran (*Budget Disrection*).
4. Keleluasaan untuk mendanai investasi dengan melakukan peminjaman, kerjasama pendanaan dengan pihak lain dan lain-lain.

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah, melalui UU ini pemerintah mencoba untuk meningkatkan sumber dana demi mendukung proses pembangunan daerah dan sekaligus mengurangi ketimpangan dan ketidakadilan dalam alokasi sumber daya nasional. Untuk itu pemerintah memberikan alokasi keuangan baru untuk daerah yang dinamakan dana perimbangan yang terdiri dari :

1. Bagian untuk daerah dari hasil pemasukan dan pengelolaan SDA.
2. Dana Alokasi Umum (DAU).
3. Dana Alokasi Khusus (DAK).

Disamping itu pemerintah daerah dibolehkan pula melakukan pinjaman luar negeri sepanjang memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Melalui desentralisasi fiskal ini pemerintah daerah diberikan wewenang pengelolaan pengeluaran keuangan yang lebih besar sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah.

2.1.2 Hubungan antara Pusat dan Daerah

Berbagai bentuk hubungan antara pusat dan daerah dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Devolusi.
2. Desentralisasi.
3. Dekonsentrasi (desentralisasi administrasi).
4. Tugas Pembantu.

Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), desentralisasi adalah penyerahan wewenang dari pemerintah pusat baik kepada pejabat-pejabat pemerintah pusat di daerah yang disebut dekonsentrasi maupun kepada badan-badan otonom daerah yang sering disebut devolusi.

Selanjutnya PBB menjelaskan ada dua prinsip penyerahan wewenang dan fungsi pemerintah. *Pertama*, dekonsentrasi dari kantor administrasi (perangkat wilayah yang berada di daerah). *Kedua*, devolusi dimana sebagian kekuasaan

pemerintah diserahkan kepada lembaga politik di daerah yang diikuti dengan penyerahan kekuasaan / kewenangan sepenuhnya untuk mengambil keputusan baik secara politis maupun administratif.

Di Indonesia, hanya tiga dari empat bentuk hubungan pusat dan daerah yang dikenal sebagaimana diatur dalam pasal 1 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:

1. Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan azas otonomi.
2. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan kepada gubernur dan bupati / walikota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
3. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten / kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

Ada enam UU dan satu Instruksi Presiden tentang administrasi pemerintahan daerah. Tiap undang-undang tersebut memberikan pendekatan yang berbeda untuk sistem desentralisasi. Salah satunya diantaranya menurut UU No. 32 Tahun 2004, konsep otonomi sedikit mengalami perubahan atas undang-undang sebelumnya UU No. 22 Tahun 1999, diantaranya;

1. Prinsip “*subsidiary*” (*Concurrent*) : kewenangan di setiap bidang dapat dibagi antar tingkatan pemerintahan.
2. Kewenangan sebuah kota besar akan berbeda dengan kewenangan kota kecil. Kota besar dapat saja memiliki kewenangan pilihan yang jauh lebih banyak di banding kota kecil. Demikian juga kabupaten akan memiliki kewenangan yang berbeda dengan kota.

Terkait praktek pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten/kota, sejalan dengan UU No. 32 Tahun 2004, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007. PP ini secara rinci menjelaskan urusan pemerintah pusat, pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten/kota untuk 31 bidang pemerintahan.

Pada tahun 2014, UU Pemerintah Daerah mengalami perubahan lagi, dengan disahkannya UU No. 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Hal baru yang diatur dalam UU ini antara lain terdapat dalam pasal 9 yang menyatakan bahwa urusan pemerintah terdiri dari urusan pemerintahan absolute, urusan pemerintah konkuren, urusan pemerintah umum. Urusan pemerintah absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sedangkan urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintah yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Dan urusan pemerintah umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.

Dari berbagai definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa desentralisasi pada dasarnya adalah suatu proses transfer/penyerahan sebagian-

wewenang dan tanggungjawab dari urusan yang semula adalah urusan pemerintah pusat kepada badan-badan atau lembaga-lembaga pemerintah daerah agar menjadi urusan rumah tangganya sehingga urusan-urusan tersebut beralih kepada daerah dan menjadi wewenang dan tanggungjawab pemerintah daerah yang tentunya dibarengi dengan penyerahan dan pengelolaan keuangannya kepada pemerintah daerah.

2.2 Anggaran Daerah

Untuk melaksanakan hak dan kewajibannya serta melaksanakan tugas yang dibebankan oleh rakyat, pemerintah harus mempunyai suatu rencana yang matang untuk mencapai suatu tujuan yang dicita-citakan. Rencana-rencana tersebut yang disusun secara matang nantinya akan dipakai sebagai pedoman dalam setiap langkah pelaksanaan tugas negara. Oleh karena itu rencana-rencana pemerintah untuk melaksanakan keuangan negara perlu dibuat dan rencana tersebut dituangkan dalam bentuk anggaran (Ghozali, 1997).

Berbagai definisi atau pengertian anggaran daerah menurut Djayasinga (2007) antara lain :

1. Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menggambarkan segala bentuk kegiatan Pemerintah daerah dalam mencari sumber-sumber penerimaan dan kemudian bagaimana dana-dana tersebut digunakan untuk mencapai tujuan pemerintah.
2. Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menggambarkan perkiraan dan pengeluaran daerah yang diharapkan terjadi dalam satu tahun kedepan yang didasarkan atas realisasinya masa yang lalu.

3. Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana kerja operasional Pemerintah Daerah yang akan dilaksanakan satu tahun kedepan dalam satuan angka rupiah. Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ini merupakan terjemahan secara moneteris dari dokumen perencanaan daerah yang ada dan disepakati yang akan dilaksanakan selama setahun.

UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menjelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Periode APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Penyusunan APBD dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada pemerintah daerah dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menjalankan APBD tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Bastian (2006) Penyusunan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang perlu menjadi acuan adalah sebagai berikut :

1. Transparansi dan Akuntabilitas anggaran.

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa, transparansi anggaran merupakan hal yang penting, Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu sarana evaluasi kinerja pemerintah yang memberikan informasi mengenai tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek.

2. Disiplin anggaran.

Anggaran yang disusun perlu diklarifikasikan dengan jelas agar tidak terjadi tumpang tindih yang dapat menimbulkan pemborosan dan kebocoran dana. Oleh karena itu penyusunan anggaran harus bersifat efisien, tepat guna, tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Keadilan anggaran.

Pembiayaan pemerintah daerah dilakukan melalui mekanisme pajak dan retribusi yang dikenakan kepada masyarakat. Oleh karena itu, penggunaannya harus dialokasikan secara adil dan proposional agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat.

4. Efisiensi dan Efektifitas anggaran.

Dana yang dihimpun dan digunakan untuk pembangunan harus dapat dirasakan manfaatnya oleh sebagian besar masyarakat. Oleh karena itu, perencanaan perlu ditetapkan secara jelas tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dengan melakukan efisiensi dan efektifitas.

5. Disusun dengan pendekatan kinerja.

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dengan pendekatan kinerja, yaitu mengutamakan upaya pencapaian hasil kinerja dari perencanaan alokasi biaya atau input yang telah ditetapkan. Hasil kerjanya harus sepadan atau lebih besar dari biaya atau input yang telah ditetapkan. Selain itu harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja setiap organisasi kerja yang terkait.

Anggaran adalah rencana kegiatan keuangan yang berisi perkiraan belanja yang diusulkan dalam satu periode dan sumber pendapatan yang diusulkan untuk membiayai belanja tersebut. Anggaran merupakan alat penting di dalam penyelenggaraan pemerintahan (Arif, 2002). Adanya keterbatasan dana yang dimiliki oleh pemerintah menjadi alasan mengapa penganggaran menjadi mekanisme terpenting untuk pengalokasian sumber daya.

Menurut Bastian (2006) menjelaskan bahwa anggaran tidak hanya sebagai rencana keuangan yang menetapkan biaya dan pendapatan pusat pertanggungjawaban dalam suatu perusahaan tetapi juga merupakan alat bagi manajer tingkat atas untuk mengendalikan, mengkoordinasikan, mengkomunikasikan, mengevaluasi kinerja dan memotivasi bawahannya.

Anggaran daerah merupakan salah satu alat yang memegang peranan penting dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan didalamnya tercermin kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan sumber-sumber kekayaan daerah. Sedangkan Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat/DPR (UU Keuangan Negara, 2003).

2.3 Alokasi Anggaran Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua pengeluaran Pemerintah Daerah pada suatu periode Anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdiri dari tiga komponen utama, yaitu unsur penerimaan, belanja rutin dan belanja pembangunan. Ketiga komponen itu meskipun disusun hampir secara bersamaan, akan tetapi proses penyusunannya berada di lembaga yang berbeda (Halim, 2002).

Proses penyusunan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara keseluruhan berada di tangan Sekretaris Daerah yang bertanggung jawab mengkoordinasikan seluruh kegiatan penyusunan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sedangkan proses penyusunan belanja rutin disusun oleh Bagian Keuangan Pemerintah Daerah, proses penyusunan penerimaan dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah dan proses penyusunan belanja pembangunan disusun oleh Bappeda (Halim, 2002).

Menurut Triwidodo (2007) belanja juga dapat dikategorikan menurut karakteristiknya menjadi dua bagian, yaitu: (1) Belanja selain modal (Belanja administrasi umum; Belanja operasi, pemeliharaan sarana dan prasarana publik; Belanja transfer; Belanja tak terduga). (2) Belanja modal.

Secara umum belanja dalam Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dikelompokkan menjadi lima kelompok yaitu :

1. Belanja administrasi umum.

Merupakan semua pengeluaran Pemerintah Daerah yang tidak berhubungan secara langsung dengan aktivitas atau pelayanan publik.

Kelompok belanja administrasi umum terdiri atas empat jenis, yaitu:

- a. Belanja pegawai merupakan pengeluaran Pemerintah Daerah untuk orang/personal yang tidak berhubungan secara langsung dengan aktivitas atau dengan kata lain merupakan biaya tetap pegawai.
- b. Belanja barang merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk penyediaan barang dan jasa yang tidak berhubungan langsung dengan pelayanan publik.

- c. Belanja perjalanan dinas merupakan pengeluaran pemerintah untuk biaya perjalanan pegawai dan dewan yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan publik.
- d. Belanja pemeliharaan merupakan pengeluaran Pemerintah Daerah untuk pemeliharaan barang daerah yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan publik.

2. Belanja operasi, pemeliharaan sarana dan prasarana publik.

Merupakan semua pengeluaran Pemerintah Daerah yang berhubungan dengan aktivitas atau pelayanan publik. Kelompok belanja ini meliputi :

- a. Belanja pegawai (Kelompok Belanja Operasi dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Publik) merupakan pengeluaran Pemerintah Daerah untuk orang/personal yang berhubungan langsung dengan suatu aktivitas atau dengan kata lain merupakan belanja pegawai yang bersifat variabel.
- b. Belanja barang (Kelompok Belanja Operasi dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Publik) merupakan pengeluaran Pemerintah Daerah untuk penyediaan barang dan jasa yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik.
- c. Belanja perjalanan (Kelompok Belanja Operasi dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Publik) merupakan pengeluaran Pemerintah Daerah untuk biaya perjalanan pegawai yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik.
- d. Belanja pemeliharaan (Kelompok Belanja Operasi dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Publik) merupakan pengeluaran Pemerintah

Daerah untuk pemeliharaan barang daerah yang mempunyai hubungan langsung dengan pelayanan publik.

3. Belanja modal merupakan pengeluaran Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya operasi dan pemeliharaan. Belanja modal dibagi menjadi :

- a. Belanja publik, yaitu belanja yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat umum.
- b. Belanja aparatur, yaitu belanja yang manfaatnya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat, tetapi dirasakan langsung oleh aparatur.

4. Belanja transfer merupakan pengalihan uang dari pemerintah daerah kepada pihak ketiga tanpa adanya harapan untuk mendapatkan pengembalian imbalan maupun keuntungan dari pengalihan uang tersebut. Kelompok belanja ini terdiri atas pembayaran :

- a. Angsuran pinjaman.
- b. Dana bantuan.
- c. Dana cadangan.

5. Belanja tak terduga adalah pengeluaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan tak terduga dan kejadian-kejadian luar biasa. Menurut Nurlan (2008) menyatakan bahwa belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan

bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

2.4 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan akumulasi dari Pos Penerimaan Pajak yang berisi Pajak Daerah dan Pos Retribusi Daerah, Pos Penerimaan Non Pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, Pos Penerimaan Investasi serta Pengelolaan Sumber Daya Alam (Bastian, 2002).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Identifikasi sumber pendapatan daerah adalah meneliti, menentukan dan menetapkan mana sesungguhnya yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan cara meneliti dan mengusahakan serta mengelola sumber pendapatan tersebut dengan benar sehingga memberikan - hasil yang maksimal.

Kendala utama yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan otonomi daerah adalah minimnya pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang rendah, di lain pihak menyebabkan Pemerintah Daerah memiliki derajat kebebasan rendah dalam mengelola keuangan daerah. Sebagian besar pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan, dibiayai dari dana perimbangan, terutama Dana Alokasi Umum (DAU). Alternatif jangka pendek peningkatan penerimaan Pemerintah Daerah adalah menggali dari Pendapatan Asli Daerah (Pratiwi, 2007).

Wujud dari desentralisasi fiskal adalah pemberian sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digunakan sendiri sesuai dengan potensi daerah. Kewenangan daerah untuk memungut pajak dan retribusi diatur dalam UU No. 34 Tahun 2000 ditindak-lanjuti dengan peraturan pelaksanaan dalam PP No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan PP No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. Berdasarkan ketentuan daerah diberikan kewenangan untuk memungut 11 jenis pajak dan 28 jenis retribusi (Halim, 2009).

Menurut Brahmantio (2002) pungutan pajak dan retribusi daerah yang berlebihan dalam jangka pendek dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, namun dalam jangka panjang dapat menurunkan kegiatan perekonomian, yang pada akhirnya akan menyebabkan menurunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Adapun kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu (Halim, 2002) :

1. Pajak Daerah.

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksa kan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Jenis Pajak Daerah dibagi menjadi 2 yaitu :

- a. Pajak Daerah Provinsi yang terdiri dari :

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor.

- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- 4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

b. Pajak Daerah Kabupaten / Kota yang terdiri dari :

- 1) Pajak Hotel.
- 2) Pajak Restoran.
- 3) Pajak Hiburan.
- 4) Pajak Reklame.
- 5) Pajak Penerangan Jalan.
- 6) Pajak Parkir.
- 7) Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C.

2. Retribusi Daerah.

Retribusi Daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi daerah. Dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) baru dengan pendekatan kinerja, jenis pendapatan yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan UU No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dirinci menjadi :

- a. Pajak Provinsi. Pajak ini terdiri atas : (i) Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, (ii) Bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) dan kendaraan di atas air, (iii) Pajak bahan bakar kendaraan

bermotor, dan (iv) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.

b. Jenis pajak Kabupaten/kota. Pajak ini terdiri atas: (i) Pajak Hotel, (ii) Pajak Restoran, (iii) Pajak Hiburan, (iv) Pajak Reklame, (v) Pajak penerangan Jalan, (vi) Pajak pengambilan Bahan Galian Golongan C, (vii) Pajak Parkir.

c. Retribusi. Retribusi ini dirinci menjadi : (i) Retribusi Jasa Umum, (ii) Retribusi Jasa Usaha, (iii) Retribusi Perijinan Tertentu.

3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut:

- a. Bagian laba perusahaan milik daerah.
- b. Bagian laba lembaga keuangan bank.
- c. Bagian laba lembaga keuangan non bank.
- d. Bagian laba atas pernyataan modal/investasi.

2.5 Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Pembagian dana untuk daerah melalui bagi hasil berdasarkan daerah penghasil cenderung menimbulkan ketimpangan antar daerah dengan mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah.

Alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) bagi daerah yang potensi fiskalnya besar namun kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) yang relatif kecil. Sebaliknya daerah yang memiliki potensi fiskalnya kecil namun kebutuhan fiskalnya besar akan memperoleh alokasi Dana alokasi Umum (DAU) relatif besar. Dengan maksud melihat kemampuan APBD dalam membiayai kebutuhan-kebutuhan daerah dalam rangka pembangunan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD dikurangi dengan belanja pegawai (Halim, 2009).

Menurut Halim (2009) ketimpangan ekonomi antara satu Provinsi dengan Provinsi lain tidak dapat dihindari dengan adanya desentralisasi fiskal. Disebabkan oleh minimnya sumber pajak dan Sumber Daya Alam yang kurang dapat digali oleh Pemerintah Daerah. Untuk menanggulangi ketimpangan tersebut, Pemerintah Pusat berinisiatif untuk memberikan subsidi berupa Dana Alokasi Umum (DAU) kepada daerah. Bagi daerah yang tingkat kemiskinannya lebih tinggi, akan diberikan Dana Alokasi Umum (DAU) lebih besar dibanding daerah yang kaya dan begitu juga sebaliknya. Selain itu untuk mengurangi ketimpangan dalam kebutuhan pembiayaan dan penugasaan pajak antara pusat dan daerah telah diatasi dengan adanya kebijakan bagi hasil dan Dana Alokasi Umum minimal sebesar 26% dari Penerimaan Dalam Negeri.

Dana Alokasi Umum (DAU) akan memberikan kepastian bagi daerah dalam memperoleh sumber pembiayaan untuk membiayai kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggung jawab masing-masing daerah. Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan

pembelanjaan. Adapun cara menghitung Dana Alokasi Umum (DAU) menurut ketentuan adalah sebagai berikut (Halim, 2009) :

1. Dana Alokasi Umum (DAU) ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN.
2. Dana Alokasi Umum (DAU) untuk daerah propinsi dan untuk Kabupaten/Kota ditetapkan masing-masing 10% dan 90% dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana ditetapkan diatas.
3. Dana Alokasi Umum (DAU) untuk suatu Kabupaten/Kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Kabupaten/Kota yang ditetapkan APBN dengan porsi Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
4. Porsi Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud di atas merupakan proporsi bobot Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

Dalam UU No. 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan Pemda, Pemerintah pusat akan mentransfer Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil yang terdiri dari pajak dan Sumber Daya Alam. Disamping Dana Perimbangan tersebut, Pemerintah Daerah memiliki sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembiayaan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Dana transfer dari Pemerintah Pusat diharapkan digunakan secara efektif dan efisien oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat.

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah bahwa kebutuhan Dana Alokasi Umum (DAU) oleh suatu daerah (Provinsi, Kabupaten, dan Kota) ditentukan dengan menggunakan pendekatan *Fiscal Gap*, dimana kebutuhan Dana Alokasi Umum (DAU) suatu daerah ditentukan atas kebutuhan daerah dengan potensi daerah. Dana Alokasi Umum (DAU) digunakan untuk menutup celah yang terjadi karena kebutuhan daerah melebihi dari potensi penerimaan daerah yang ada.

2.6 Flypaper Effect

Flypaper Effect adalah suatu kondisi yang terjadi saat pemerintah daerah merespon (belanja) lebih banyak dengan menggunakan dana transfer (grants) yang diprosikan dengan DAU daripada kemampuan daerah sendiri (private income) yang diprosikan dengan PAD (Oates, 1999). Karena itu *flypaper effect* dianggap sebagai tambahan pendapatan masyarakat sehingga harus dibelanjakan dengan cara yang sama pula dengan Pendapatan Asli Daerah (Pramuka, 2013). *Flypaper effect* membawa implikasi meningkatkan belanja pemerintah daerah lebih besar daripada penerimaan transfer itu sendiri serta kecendrungan untuk menanti bantuan dari pusat dibanding mengelola sumber daya daerah sendiri (Turnbull, 1998).

Menurut Afrizawati, (2012) Secara implisit terdapat beberapa implikasi dari terjadinya *Flypaper Effect* pada belanja daerah, seperti :

- a. Menyebabkan celah kepincangan fiskal akan tetap ada. *Fiscal gap* merupakan kerangka kebijakan pemerintah pusat dalam memberikan DAU kepada daerah, maka jika terjadi *Flypaper Effect* artinya pencapaian

pemberian dana transfer kurang optimal. Ini terlihat pada analisis perkembangan DAU dan belanja daerah.

- b. Menimbulkan ketidakmaksimalan dalam pemanfaatan sumber-sumber penghasilan pertumbuhan PAD, seperti peningkatan penerimaan pajak daerah, serta sumber daya alam lainnya. Ini terlihat dari proporsi rasio rata-rata DAU dan PAD, dimana proporsi rata-rata DAU lebih besar dibandingkan dengan PAD yang hanya memberikan kontribusi lebih kecil terhadap belanja daerah.
- c. Menyebabkan unsur ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat tetap ada, karena secara langsung pemberian DAU kepada daerah yang berarti pemerintah pusat mensubsidi pengeluaran daerah untuk mengurangi beban pembiayaan.
- d. Adanya respon yang berlebihan dalam pemanfaatan dana transfer dimana seharusnya pemerintah pusat membuat kinerja *monitoring* dan evaluasi pada pemerintah daerah dalam rangka memonitor, mengontrol, dan mengevaluasi penggunaan dana DAU.

Implikasi yang paling penting dari *Flypaper effect* ini adalah adanya kecendrungan melakukan manipulasi pengeluaran pemerintah setinggi mungkin dengan tidak mengupayakan memaksimalkan PAD agar nantinya dapat memperoleh bantuan berupa transfer dari pemerintah pusat.

2.7 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu telah dipilih sebagai dasar pertimbangan dalam penyusunan skripsi ini. Berikut adalah hasil penelitian terdahulu:

Penelitian pertama oleh Rahmawati (2010), Dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Jawa Tengah. Hasil penelitian mendapatkan bahwa pengujian tentang pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah konsisten dengan penelitian sebelumnya. Besarnya belanja daerah selama ini sangat ditentukan oleh faktor Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU).

Penelitian kedua oleh Sari dan Yahya (2009), Pada penelitian yang dilakukannya yang berjudul Analisis Dana Alokasi Umum (DAU) dalam era otonomi daerah studi kasus pada 30 Provinsi, hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh yang positif antara Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mempengaruhi Belanja Daerah.

Selanjutnya penelitian oleh Maemunah (2006), Dalam penelitiannya yang berjudul *flypaper effect* pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatra. Hasil penelitian mendapatkan bahwa besarnya nilai Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempengaruhi besarnya nilai Belanja Daerah (pengaruh signifikan). Telah terjadi *flypaper effect* pada Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Sumatera.

Penelitian keempat oleh Prakoso (2004), Dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Prediksi Belanja Daerah di Provinsi Jawa Tengah dan

DIY. Menyatakan bahwa semakin besar Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima oleh daerah dari pemerintah pusat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang didapat akan menentukan besarnya alokasi Belanja Daerah. Dan dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa PAD dan DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.

Penelitian kelima oleh Abdullah dan Halim (2003), Dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah studi kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik secara parsial maupun simultan terdapat pengaruh antara Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah.

Dari penjelasan penelitian terdahulu diatas terdapat beberapa penelitian yang dijadikan sebagai pedoman utama dalam penelitian ini yaitu pada penelitian Rahmawati, Prakoso dan Maimunah.

2.8 Kerangka Pemikiran

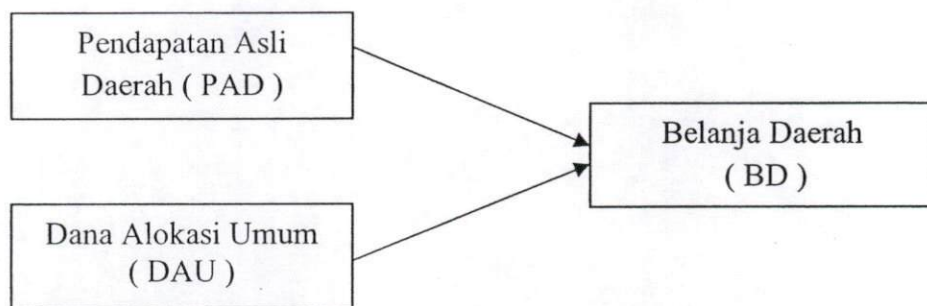
Dalam literatur ekonomi dan keuangan daerah, hubungan pendapatan dan belanja daerah didiskusikan secara luas sejak akhir dekade 1950-an dapat dirumuskan dengan rumus sebagai berikut :

$$Y = C + I + S$$

Notasi Y dalam rumus diatas adalah merupakan pendapatan dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU), sedangkan C adalah belanja daerah oleh karena itu apabila Pendapatan

Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) naik maka belanja daerah juga akan mengalami peningkatan. Adapun kerangka pemikiran penelitian ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini ;

Gambar 2.1 : Bagan Kerangka Penelitian



Dan kerangka pemikiran tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa Dana Alokasi Umum yang berasal dari Pemerintah pusat sebagai dana perimbangan akan mempengaruhi Belanja Daerah selain itu juga Pendapatan Asli Daerah yang merupakan sumber pendapatan yang berasal dan daerah sendiri akan mempengaruhi Belanja Daerah. Dengan demikian semakin besar Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah akan mampu membiayai Belanja Daerah.

2.9 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara yang hendak diuji kebenarannya dengan melihat hasil analisis penelitian.

2.9.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah

Studi tentang pengaruh pendapatan daerah (*local own resources revenue*) terhadap pengeluaran daerah sudah banyak dilakukan, sebagai contoh penelitian yang pernah dilakukan oleh Prakoso (2004), Syukri & Halim (2003) menyatakan

pendapatan (terutama pajak) akan mempengaruhi Anggaran Belanja Pemerintah Daerah (*tax spend hyphotesis*). Dalam hal ini pengeluaran Pemerintah Daerah akan disesuaikan dengan perubahan dalam penerimaan Pemerintah Daerah atau perubahan pendapatan terjadi sebelum perubahan pengeluaran.

Kebijakan desentralisasi ditujukan untuk mewujudkan kemandirian daerah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat (UU No. 32 Tahun 2004).

Kemampuan daerah untuk menyediakan pendanaan yang berasal dari daerah sangat tergantung pada kemampuan merealisasikan potensi ekonomi tersebut menjadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan perguliran dana untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Melihat beberapa hasil penelitian diatas telah menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan penting bagi sebuah daerah dalam memenuhi belanjanya. Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini sekaligus dapat menunjukan tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin banyak Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang didapat semakin memungkinkan daerah tersebut untuk memenuhi kebutuhan belanjanya sendiri tanpa harus tergantung pada Pemerintah Pusat, yang berarti ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah tersebut telah mampu untuk mandiri, dan begitu juga sebaliknya.

Belanja Daerah adalah semua pengeluaran Pemerintah Daerah pada suatu periode anggaran. Alokasi Belanja Daerah terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang tidak

memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Sedangkan Belanja Langsung merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal (Halim, 2007).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap alokasi Belanja Daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peran yang cukup besar dalam menentukan kemampuan daerah untuk melakukan aktivitas pemerintah dan program-program pembangunan daerah. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat serta menjaga dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. Jadi, PAD berpengaruh terhadap Belanja Daerah.

H₁ : Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah

2.9.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah

Untuk memberikan dukungan terhadap pelaksanaan otonomi daerah telah diterbitkan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang didalamnya berisi tentang sumber pembiayaan Pemerintah Daerah dalam rangka perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah dilaksanakan atas dasar desentralisasi, dekonsentralisasi, dan pembantuan. Adapun sumber-sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi terdiri dari

Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah.

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya di dalam pelaksanaan desentralisasi. Berkaitan dengan dana perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, hal tersebut merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah secara leluasa dapat menggunakan dana ini untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Dalam literatur ekonomi dan keuangan daerah, hubungan Pendapatan dan Belanja Daerah didiskusikan secara luas sejak akhir dekade 1950-an, berbagai hipotesis tentang hubungan yang diuji secara empiris menyatakan bahwa pendapatan mempengaruhi belanja. Sementara studi tentang pengaruh *grants* dari Pemerintah Pusat terhadap keputusan pengeluaran atau Belanja Pemerintah Daerah sudah berjalan lebih dari 30 tahun (Prakoso, 2004). Holtz-Eakin, *et al* (1985) dalam Prakoso (2004) menyatakan bahwa terdapat keterkaitan sangat erat antara transfer dari Pemerintah Pusat dengan Belanja Pemerintah Daerah.

Melihat beberapa hasil penelitian diatas telah menunjukan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan sumber pendapatan penting bagi sebuah daerah dalam memenuhi belanjanya. Dana Alokasi Umum ini juga sekaligus untuk menunjukan bagaimana tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin banyak Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima maka berarti daerah tersebut masih sangat tergantung terhadap Pemerintah Pusat dalam memenuhi belanjanya, ini

menandakan bahwa daerah tersebut belumlah mandiri, dan begitu juga sebaliknya (Pambudi, 2007).

Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota. Tujuan dari pemberian Dana Alokasi Umum (DAU) ini adalah pemerataan dengan memperhatikan potensi daerah, luas daerah, keadaan geografis, jumlah penduduk dan tingkat pendapatan. Jaminan keseimbangan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam rangka penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakat.

Oleh karena itu Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan sumber dana yang dominan dan dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Sebagai tujuan dari desentralisasi yaitu untuk mempercepat pembangunan disamping tetap memaksimalkan potensi daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Jadi, Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki pengaruh terhadap belanja daerah.

H₂ : Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.

2.9.3 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Daerah

Penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya mengenai Hubungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap pengaruhnya ke Belanja Daerah menemukan hasil yang secara umum serempak, maksudnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi Belanja Daerah. PAD yang berasal dari hasil kekayaan daerah adalah sumber pendapatan

utama dari daerah selain dari transfer/bantuan dari pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Umum. Pendapatan Asli Daerah yang menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 merupakan pendapatan daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan diharapkan menjadi barometer utama terhadap suksesnya pelaksanaan otonomi di daerah, diharapkan dengan adanya otonomi, kemandirian daerah dapat diwujudkan yang dimanifestasikan lewat struktur PAD yang kuat.

DAU sendiri ditransfer oleh pemerintah semata-mata untuk menjamin desentralisasi di daerah berjalan dengan baik agar terjadi pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya. Atau dengan kata lain tujuan di berikannya DAU ini adalah untuk *horizontal equity* dan *sufficiency*. Tujuan *horizontal equity* merupakan kepentingan pemerintah pusat dalam rangka melakukan distribusi pendapatan secara adil dan merata agar tidak terjadi kesenjangan yang lebar antar daerah. Sementara itu yang menjadi kepentingan daerah adalah kecukupan (*sufficiency*), terutama untuk menutup *fiscal gap*.

Fiscal gap terjadi karena karakteristik di daerah yang beraneka ragam. Ada daerah yang dianugerahi kekayaan alam yang sangat melimpah, ada juga daerah yang sebenarnya tidak memiliki kekayaan alam yang besar namun karena struktur perekonomian mereka telah tertata dengan baik maka potensi pajak dapat dioptimalkan sehingga daerah tersebut menjadi kaya. Namun banyak juga daerah yang secara alamiah maupun struktur ekonomi yang masih sangat tertinggal, untuk itulah maka transfer dari pemerintah pusat dalam bentuk DAU masih diberikan untuk mengatasi kesenjangan di daerah.

Maemunah (2006) dalam penelitiannya berjudul Pengaruh PAD dan DAU terhadap Belanja Pemerintah Daerah studi kasus kabupaten/kota di Pulau Sumatera menunjukkan hasil dimana Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum baik secara terpisah ataupun bersama-sama keduanya berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Demikian juga dengan penelitian yang dilakukan Rahmawati (2008) yang meneliti di pengaruh PAD dan DAU terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, yang kurang lebih memperlihatkan hasil yang sama dimana baik PAD dan DAU secara terpisah ataupun bersama-sama secara sah mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap belanja daerah.

Pemerintah daerah dapat terselenggara karena adanya dukungan berbagai faktor sumber daya yang mampu menggerakkan jalannya roda organisasi pemerintah dalam rangka tercapainya tujuan. Faktor keuangan merupakan faktor utama yang merupakan sumber daya finansial bagi pembiayaan penyelenggaraan roda pemerintah daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu dari sumber pembiayaan pemerintah daerah guna mendukung jalannya program-program serta pelayanan yang dibuat pemerintah daerah demi terciptanya pembangunan daerah yang berkelanjutan sekaligus dapat meningkatkan taraf kesejahteraan hidup rakyat memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. Jadi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Pemerintah Daerah.

H₃ : Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.

BAB III

METODE PENELITIAN

Untuk memenuhi kriteria penelitian yang sistematis, logis, nyata, dan dapat diulang-ulang, maka perlu membangun desain penelitian yang tepat. Metode penelitian merupakan langkah dan prosedur dalam melakukan pengumpulan data atau informasi guna memecahkan permasalahan dan menguji hipotesis penelitian. Dalam metode penelitian pada bab ini akan menjelaskan jenis penelitian, populasi penelitian, jenis data, metode pengumpulan data, model penelitian dan metode analisis data.

Adapun desain penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penulis menggunakan desain kausal dalam penelitian ini. Desain kausal dipakai untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen (Kuncoro, 2001).

Hubungan ini bertujuan untuk melihat berapa besar kontribusi yang diberikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai variabel Independen terhadap Belanja Daerah kota Bukittinggi sebagai variabel Dependen.

Pendekatan penelitian ini termasuk pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif adalah pendekatan yang menggunakan teknik pengolahan data dimana

data-data yang berbentuk angka diklasifikasikan, dibandingkan dan dihitung dengan rumus-rumus yang relevan (Sekaran, 2007)

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif yang bersifat *ex post facto* yakni mempelajari fakta-fakta yang sudah ada. Prosesnya berupa mendeskripsikan dengan cara menginterpretasi data yang telah diolah.

3.2 Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah Kantor Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bukittinggi. Yaitu data-data yang diolah dan diambil dari kantor Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Bukittinggi.

a. Populasi.

Populasi adalah keseluruhan cakupan daerah subjek atau karakter atas obyek yang akan diteliti dan dikenai generalisasi. Dari pendapat tersebut diketahui bahwa populasi merupakan keseluruhan subjek penelitian yang dapat ditarik kesimpulan.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh data Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi rentang tahun 2005-2014 yang telah dipublikasikan lewat laporan APBD-nya. Nantinya seluruh populasi ini juga dijadikan sebagai sampel dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian data pajak, data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data *Time Series* (runtut

waktu) selama tahun 2005 sampai dengan tahun 2014 mulai bulan Januari sampai bulan Desember meliputi data: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum serta Belanja Daerah Kota Bukittinggi.

b. Sampel.

Sampel adalah obyek, wilayah atau peristiwa yang dijadikan cermin dari populasi atau kumpulan elemen yang merupakan bagian dari populasi (Zuhri, 2001). Sampel harus memiliki sifat-sifat yang sama sebagaimana yang dimiliki oleh populasinya. Dalam penelitian ini yang akan diambil sampelnya adalah keseluruhan data dari populasi yang ada yaitu: data Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum serta Belanja Daerah Kota Bukittinggi selama Tahun Anggaran 2005 s/d 2014.

3.3 Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional

3.3.1 Variabel Penelitian

Variabel penelitian merupakan fenomena ekonomi yang dapat diukur dalam penelitian (Suliyanto, 2011). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu variabel dependen (variabel terkait) dan variabel independen (variabel bebas).

1. Variabel Dependen.

Variabel Dependen adalah variabel yang variasinya dipengaruhi oleh variasi variabel independen. Variasi perubahan variabel dependen ditentukan oleh variasi perubahan variabel independen (Suliyanto, 2011).

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Belanja Daerah.

2. Variabel Independen.

Variabel Independen adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab besar kecilnya nilai variabel yang lain. Variasi perubahan variabel independen akan berakibat terhadap variasi perubahan variabel dependen (Suliyanto, 2011). Variabel independen dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU).

3.3.2 Definisi Operasional

Definisi Operasional adalah segala sesuatu yang didasarkan pada sifat-sifat yang akan didefinisikan, dengan kata lain keseluruhan variabel yang perlu didefinisikan secara operasional agar dapat memberikan persamaan persepsi dan konsepsi bagi semua pembaca.

- a. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan tugas pemerintah daerah. PAD merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU Nomor 32 Tahun 2004).
- b. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU Nomor 33 Tahun 2004).
- c. Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam

periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah (UU Nomor 32 Tahun 2004).

3.4 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dimana data diukur dalam suatu skala numerik.

Jenis dari sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Umar (2003) data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut, misalnya dalam bentuk tabel, grafik, diagram, gambar dan sebagainya, sehingga lebih informatif jika digunakan pihak lain.

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data *time series* dan *cross section*. *Data time series* atau sering disebut juga data deret waktu merupakan sekumpulan data dari suatu fenomena tertentu yang didapat dalam beberapa interval waktu tertentu, misalnya dalam waktu mingguan, bulanan atau tahunan. Sedangkan data *cross section* atau sering disebut data satu waktu merupakan sekumpulan data fenomena dalam satu kurun waktu saja. (Umar, 2003).

Data sekunder tersebut diperoleh dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Bukittinggi dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bukittinggi.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data merupakan suatu cara atau proses yang sistematis dalam pengumpulan, pencatatan dan penyajian fakta untuk tujuan

tertentu. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Penelitian Lapangan yaitu data yang diperoleh dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari pengumpulan data berupa Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2005-2014.
- b. Penelitian Kepustakaan merupakan data sekunder yang dikumpulkan berupa data teoritis, penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini.

3.6 Metode Analisis Data

Data penelitian ini dianalisis dengan menggunakan model regresi linier berganda yaitu menggunakan pooled data tahun mulai tahun 2005-2014. Data diolah dengan SPSS versi 20.0. Rumus regresi berganda adalah :

Persamaan dibawah ini menjelaskan bagaimana hubungan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah.

$$BD = \alpha + \beta_1 PAD + \beta_2 DAU + \varepsilon$$

Dimana : BD = Belanja Daerah Kota Bukittinggi.

PAD = Pendapatan Asli Daerah.

DAU = Dana Alokasi Umum.

α = Konstanta.

β_1, β_2 = Koefisien Regresi.

ε = Variabel gangguan yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

3.6.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan data dalam bentuk kuantitatif dengan tidak menyertakan pengambilan keputusan melalui hipotesis dan data disajikan tanpa diolah dengan teknik-teknik analisis statistik lainnya (Sarwono, 2009). Pada penelitian ini, penulis menggunakan statistik deskriptif untuk mengetahui ukuran pemusatan data (*mean*) dan ukuran penyebaran data (*standar deviasi*, nilai maksimum, dan nilai minimum) dengan bantuan software SPSS (*Statistical Package for the Social Sciences*) versi 20.0

3.6.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan suatu pengujian yang perlu dilakukan terhadap data sebelum melakukan analisis regresi. Uji asumsi klasik yang harus dipenuhi oleh analisis regresi adalah residual terdistribusi normal, tidak adanya multikoleneartitas, tidak ada heteroskedastisitas, dan tidak adanya autokorelasi (Priyatno, 2012).

3.6.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2005). Jika terdapat normalitas, maka residual terdistribusi secara normal dan independen yaitu perbedaan antara nilai prediksi dengan skor yang sesungguhnya atau error akan terdistribusi secara simetri di sekitar nilai means sama dengan nol. Uji normalitas dapat juga dilihat melalui grafik histogram dan grafik normal plot.

3.6.2.2 Uji Multikoleneartitas

Multikoleneartitas adalah keadaan dimana pada model regresi ditemukannya adanya korelasi yang sempurna atau mendekati sempurna antarvariabel independen. Pada model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi yang sempurna antar-variabel bebasnya (Priyatno, 2012). Metode yang penulis gunakan dalam menguji multikoleneartitas pada penelitian ini adalah dengan melihat nilai *tolerance* dan *varian inflation factor (VIF)*. Suatu model regresi yang baik bebas dari multikoleneartitas dengan kriteria angka *tolerance* lebih dari 0,1 dan *VIF* kurang dari 10.

3.6.2.3 Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah korelasi antara anggota observasi yang disusun menurut waktu dan tempat (Priyatno, 2009). Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi ada korelasi antara residual periode t dengan residual periode $t-1$ (sebelumnya). Model regresi yang baik seharusnya tidak terdapat masalah autokorelasi. Metode pengujian yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan uji *Durbin-Watson (DW test)* pada tingkat signifikansi 0,05.

Kriteria pengujian pada uji *Durbin-Watson (DW test)* ini adalah (Priyatno, 2009) :

- Jika $DW < dL$ atau $dW > 4 - dL$, berarti terdapat autokorelasi.
- Jika DW terletak diantara dU dan $4 - dU$ ($dU < DW < 4 - dU$), maka artinya tidak terjadi autokorelasi.

- Jika DW terletak diantara dU dan dL atau di antara $4 - dU$, dan $4 - dL$ maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti.

Nilai dU (batas atas) dan dL (batas bawah) dapat diperoleh dari tabel *Durbin-Watson*. Adapun kriteria lain yang bisa diterapkan dalam model regresi ini yaitu dengan mengacu kepada nilai yang terdapat dalam tabel *Durbin-Watson*, apabila nilai *Durbin-Watson* berkisar antara 1,55 sampai 2,46 (untuk $n < 15$) maka dapat dikatakan model regresi tersebut bebas dari masalah autokorelasi.

3.6.2.4 Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas yaitu suatu keadaan dimana dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya dan pada model regresi yang baik tidak terjadi heteroskedastisitas (Priyatno, 2012). Pengujian heteroskedastisitas pada penelitian ini dengan melihat pola titik-titik pada *Scatterplots Regresi*.

Dasar pengambilan keputusannya (Priyatno, 2012) :

Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka artinya terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, seperti titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka pada sumbu Y, maka artinya tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.6.3 Pengujian Hipotesis

3.6.3.1 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik T)

Uji parsial dengan menggunakan *Uji t*, dimana uji ini dilakukan untuk melihat pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) secara parsial terhadap Belanja Daerah. Kriteria pengujiaanya (Priyatno, 2009) :

- Jika $-t_{tabel} \leq t_{hitung} \leq t_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a Ditolak.

(Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum secara parsial tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah).

- Jika $-t_{hitung} < -t_{tabel}$ atau $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

(Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum secara parsial berpengaruh terhadap Belanja Daerah).

3.6.3.2 Uji signifikansi Parameter Simultan (Uji Statistik F)

Uji simultan dengan menggunakan *Uji F*, dimana uji ini dilakukan untuk melihat pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) serentak secara bersama-sama terhadap Belanja Daerah. Kriteria pengujiaanya berdasarkan f_{hitung} dan f_{tabel} (Priyatno, 2009) :

- Jika $f_{hitung} \leq f_{tabel}$, maka H_0 Diterima dan H_a Ditolak,

(Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) secara simultan tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah).

- Jika $f_{hitung} > f_{tabel}$, maka H_0 Ditolak dan H_a Diterima,

(Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Daerah).

Dengan tingkat kepercayaan untuk pengujian hipotesis adalah 5% atau $(\alpha) = 0,05$, maka kriteria pengujiannya :

- Jika signifikansi $> 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a Ditolak,

(Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) secara simultan tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah).

- Jika signifikansi $< 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a Diterima,

(Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Daerah).

3.6.3.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2), merupakan sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dan biasanya angka ini diubah dalam bentuk persentase (Priyatno, 2012). Dari koefisien determinasi ini akan terlihat seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen dan sisanya akan dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak ada dalam model regresi.

Nilai yang digunakan adalah nilai *Adjusted R Square* (*Adjusted R^2*). *Adjusted R Square* merupakan nilai koefisien determinasi yang telah disesuaikan terhadap tingkat signifikansi dalam model regresi. Nilai *Adjusted R Square* adalah

antara nol dan satu. Jika nilai *Adjusted R Square* mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen dan model regresi tersebut akan semakin baik.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan menjelaskan tentang kondisi geografis dan kondisi demografis Kota Bukittinggi. Selanjutnya pada bab ini juga akan dijelaskan bagaimana perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Belanja Daerah di Kota Bukittinggi.

4.1 Data Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum

4.1.1.1 Kondisi Geografis dan Iklim Kota Bukittinggi

Kota Bukittinggi berada dibagian barat Indonesia, terletak antara 100°20-100°25 Bujur Timur dan 00°16-00°20 Lintang Selatan dengan ketinggian sekitar 780 – 950 Meter dari permukaan laut. Wilayah Kota Bukittinggi semuanya dibatasi oleh Kabupaten Agam. Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Gadut dan Kapau Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam, sebelah Selatan dengan Taluak Suku Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam, Sebelah Barat dengan Nagari Sianok, Guguak, dan Koto Gadang Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam, dan Disebelah Timur berbatasan dengan Nagari Tanjung Alam, Ampang Gadang Kecamatan IV Angkek Kabupaten Agam.

Luas daratan Kota Bukittinggi adalah 25,239 Km², luas tersebut merupakan 0,06 persen dari luas Provinsi Sumatera Barat, dimana Permukaan Bumi tidak rata, bergelombang dan berbukit.

Di Kota Bukittinggi terdapat sungai kecil yaitu : Batang Tambuo di sebelah Timur, Batang Sianok mengalir di sebelah Barat. Tanahnya merupakan lapisan Tuff dari lereng Gunung Merapi, oleh sebab itu tanahnya subur.

Kota Bukittinggi terdiri dari 3 Kecamatan dan 24 Kelurahan, dengan Kecamatan terluas wilayahnya adalah Kecamatan Mandiangin Koto Selayan sebesar 12,156 Km². Jarak kota bukittinggi dari Ibukota Propinsi Sumatera Barat sekitar 90 Km, mengenai iklim di Kota Bukittinggi dengan temperatur udara berkisar antara Max. 24,9° C Min. 16,1° C, Sementara kelembaban udara berkisar Max. 90,8% Min. 82,0% dan tekanan udara berkisar 22. C – 25. C yang membuat daerah Kota Bukittinggi menjadi daerah yang asri, sejuk sehingga pada saat pagi hari suasana dingin masih sangat terasa.

4.1.1.2 Kondisi Demografi Kota Bukittinggi

Kondisi demografi Kota Bukittinggi dapat dilihat dari gambaran penyebaran penduduk Kota Bukittinggi tahun 2013 sebagai berikut :

Tabel 4.1

Penyebaran Penduduk Kota Bukittinggi per Kecamatan dan Jumlah per Jenis Kelamin Tahun 2013

Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Rumah Tangga	Laki-Laki (Orang)	Perempuan (Orang)	Total	Kepadatan (Orang per Km ²)
Guguak Panjang	6,831	10,507	20,623	22,004	42,627	6,240
Mandiangin Koto Selayan	12,156	10,919	22,701	23,641	46,342	3,812
Aur Birugo Tigo Baleh	6,252	6,263	11,963	13,483	25,446	4,070
Jumlah	25,239	27,689	55,287	59,128	114,415	4,533

Sumber : BPS Kota Bukittinggi 2013

Berdasarkan tabel 4.1 jumlah penduduk Kota Bukittinggi tahun 2013 adalah sekitar 114.415 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk adalah 1,93% pertahun. Penyebaran penduduk Kota Bukittinggi dapat dilihat pada Tabel 4.1 dimana penduduk yang paling banyak adalah di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan yaitu 40,56%. Tingginya tingkat penyebaran penduduk di Kecamatan ini ditandai dengan banyaknya pembangunan perumahan baik yang dilakukan oleh perusahaan pengembang maupun oleh perorangan.

Namun demikian Kecamatan Guguk Panjang masih menjadi Kecamatan dengan tingkat kepadatan paling tinggi yaitu 6,240 jiwa per Km², diikuti Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh sebanyak 4,070 jiwa per Km², dan Kecamatan Mandiangin Koto Selayan sebanyak 3,812 jiwa per Km². Penduduk Bukittinggi diantaranya juga terdapat beberapa warga negara asing, seperti China, India, dan Negara Asing lainnya. Tahun 2013 terdapat 17 warga Negara China, 4 warga Negara India dan 1 jiwa dari Negara Asing lainnya.

4.1.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bukittinggi

APBD merupakan rencana pendapatan, belanja daerah dan pembiayaan untuk satu tahun. APBD juga merupakan wujud tahunan dari rencana jangka panjang daerah serta rencana jangka menengah yang dibuat dari visi misi kepala daerah. APBD dipersiapkan oleh Pemerintah Daerah, lalu dibahas dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sehingga pada akhirnya merupakan menjadi produk hukum daerah berupa peraturan daerah yang harus diikuti oleh segenap lembaga di daerah. Ringkasan APBD Kota Bukittinggi dari Tahun 2005-2014 dapat dilihat pada tabel 4.2 halaman 62.

Berdasarkan tabel 4.2 tersebut, terlihat perkembangan APBD Kota Bukittinggi selama 10 tahun terakhir mengalami fluktuasi namun cenderung meningkat. Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan surplus atau defisit APBD. Pada tabel 4.2 terlihat bahwa APBD Kota Bukittinggi mengalami surplus terbesar pada tahun 2014 yaitu sebesar 53.374.000.000 dan defisit terbesar pada tahun 2010 sebesar 24.815.000.000. selanjutnya pembiayaan netto merupakan selisih antara penerimaan dengan pengeluaran pembiayaan. Jika terjadi defisit, maka jumlah pembiayaan netto harus dapat menutupi defisit APBD. Sedangkan SILPA tahun berjalan merupakan selisih antara surplus atau defisit APBD dengan pembiayaan netto.

4.1.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bukittinggi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dijelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan investasi lainnya, serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah. Pendapatan Asli Daerah di Kota Bukittinggi merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan kegiatan-kegiatan Pemerintah Daerah.

Tabel 4.2
APBD Kota Bukittinggi 2005-2014
(Dalam Jutaan Rupiah)

URAIAN	TAHUN									
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
I. PENDAPATAN DAERAH	162.515	247.441	295.060	326.212	337.523	338.421	401.417	461.396	527.475	595.424
A. Pendapatan Asli Daerah	19.320	24.397	27.775	33.828	44.924	33.847	49.253	45.076	55.203	61.613
B. Dana Perimbangan	140.457	222.928	265.542	290.768	291.185	279.482	305.965	365.939	408.815	452.713
C. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	2.737	115,320	1.743	1.614	1.414	25.092	46.199	50.381	63.456	81.098
II. BELANJA DAERAH	157.118	224.543	278.952	290.389	346.691	363.236	405.420	447.443	504.110	542.050
A. Belanja Tidak Langsung	107.480	136.063	189.983	221.413	206.463	232.236	260.866	289.831	292.653	331.190
B. Belanja Langsung	49.639	88.480	87.745	68.488	140.228	130.452	144.554	157.612	211.457	210.860
Surplus/(Defisit)	5.397	22.897	16.108	35.823	(9.167)	(24.815)	(4.003)	13.954	23.365	53.374
III. PEMBIAYAAN	(5.397)	(22.897)	45.415	61.400	99.626	90.438	63.311	56.937	51.960	45.741
A. Penerimaan Pembiayaan	19.944	24.184	46.436	62.369	99.631	90.458	65.622	59.307	70.892	75.324
B. Pengeluaran Pembiayaan	25.340	47.081	1.021	969,144	4,542	20,000	2.311	2.370	18.932	29.583
Pembiayaan Neto	(5.397)	(22.897)	45.415	61.400	99.626	90.438	63.310	56.937	51.960	45.741
SILPA tahun berjalan	3.151	2.680	61.524	97.223	90.459	65.623	59.307	70.891	75.325	99.115

Sumber : data diolah, DPKAD Kota Bukittinggi, 2005-2014

Berikut merupakan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi :

Tabel 4.3

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bukittinggi Tahun 2005-2014
(dalam Rupiah)

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	(%) Pertumbuhan
2005	19.320.000.000	-
2006	24.397.000.000	26,27 %
2007	27.775.000.000	13,84 %
2008	33.828.000.000	21,80 %
2009	44.924.000.000	32,80 %
2010	33.847.000.000	-24,65 %
2011	49.253.000.000	45,51 %
2012	45.076.000.000	-8,48 %
2013	55.203.000.000	22,46 %
2014	61.613.000.000	11,6 %
Rata-rata pertumbuhan		15,68 %

Sumber : data diolah, DPKAD Kota Bukittinggi, 2005-2014.

Tabel diatas menggambarkan perkembangan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi dari Tahun 2005-2014 mengalami fluktuasi dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 15,68 %. Dimana pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi yang tertinggi terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 45,51 %. Sedangkan yang terendah terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar -24,66 %.

4.1.4 Dana Alokasi Umum (DAU) Kota Bukittinggi

Dana Alokasi Umum (DAU) di Kota Bukittinggi mengalami fluktuasi setiap tahunnya namun cenderung mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 16 % per tahun. Nilai DAU yang semakin meningkat dapat diketahui dengan tabel berikut :

Tabel 4.4

Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) Kota Bukittinggi Tahun 2005-2014
(dalam Rupiah)

Tahun	Dana Alokasi Umum (DAU)	(%) Pertumbuhan
2005	114.818.000.000	-
2006	183.130.000.000	59,5 %
2007	211.433.000.000	15,45 %
2008	236.404.000.000	11,80 %
2009	236.106.000.000	-0,13 %
2010	242.306.000.000	2,62 %
2011	272.853.000.000	12,60 %
2012	326.224.000.000	19,56 %
2013	368.311.000.000	12,90 %
2014	404.285.000.000	9,76 %
Rata-rata pertumbuhan		16,00 %

Sumber : data diolah, DPKAD Kota Bukittinggi, 2005-2014.

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa pertumbuhan Dana Alokasi Umum di Kota Bukittinggi tertinggi terjadi pada Tahun 2006 yaitu sebesar 59,5%, sedangkan pertumbuhan DAU terendah pada tahun 2009 yaitu sebesar - 0,13%.

4.1.5 Belanja Daerah Kota Bukittinggi

Belanja daerah mengalami fluktuasi setiap tahunnya namun cenderung meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 15,28% per tahun. Berikut merupakan Realisasi Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2005-2014 :

Tabel 4.5

Realisasi Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2005-2014

(dalam Rupiah)

Tahun	Belanja Daerah	(%) Pertumbuhan
2005	157.118.000.000	-
2006	224.543.000.000	42,91 %
2007	278.952.000.000	24,23 %
2008	290.389.000.000	4,09 %
2009	346.691.000.000	19,4 %
2010	363.236.000.000	4,77 %
2011	405.420.000.000	11,61 %
2012	447.443.000.000	10,36 %
2013	504.110.000.000	12,66 %
2014	542.050.000.000	7,52 %
Rata-rata pertumbuhan		15,28 %

Sumber : data diolah, DPKAD Kota Bukittinggi, 2005-2014

Dari tabel diatas terlihat bahwa perkembangan Belanja Daerah Kota Bukittinggi yang paling tinggi adalah pada Tahun 2006 yaitu sebesar 42,91 %. Dan yang terendah adalah Tahun 2008 yaitu sebesar 4,09 %. Hal ini disebabkan pada Tahun 2008, tercatat beberapa kali mengalami inflasi negatif (deflasi)

terhadap bahan makanan pokok dan sandang walaupun angkanya cukup kecil, Namun pada Tahun 2009 Belanja Daerah Kota Bukittinggi mengalami peningkatan sebesar 19,39 %.

4.2 Analisis Data

4.2.1 Statistik Deskriptif

Pada statistik ini, menjelaskan nilai tertinggi (maximum), nilai terendah (minimum), mean (rata-rata), dan standar deviasi suatu data.

Tabel 4.6
Statistik Deskriptif Data Penelitian

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Belanja Daerah	10	157118000000	542050000000	355995700000	122279749784
Pendapatan Asli Daerah	10	19320000000	61613000000	39523800000	13857156874
Dana Alokasi Umum	10	114818000000	404285000000	259587000000	86849091111
Valid N (listwise)	10				

Pengujian terhadap 10 observasi (N) menghasilkan nilai variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terkecil sebesar 19.320.000.000.

Hal ini berarti jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diterima Pemerintah Kota Bukittinggi yang menjadi sampel terkecil berjumlah 19.320.000.000 dan terbesar berjumlah 61.613.000.000.

Rata-rata Pendapatan Asli Daerah (PAD) berjumlah 39.523.800.000. Sedangkan standar deviasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 13.857.156.874 dan ini menunjukkan variasi yang terdapat dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bukittinggi.

Pada variabel Dana Alokasi Umum (DAU) yang terkecil adalah 114.818.000.000 dan yang terbesar 404.285.000.000. hal ini berarti jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) menjadi sampel terkecil yang berjumlah 114.818.000.000 dan yang terbesar berjumlah 404.285.000.000. Rata-rata Dana Alokasi Umum (DAU) berjumlah sebesar 259.587.000.000. dan standar deviasi Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 86.849.091.111 bahwa ini menunjukkan variasi yang terdapat dalam Dana Alokasi Umum (DAU) di Kota Bukittinggi.

Pada variabel Belanja Daerah, sebagai variabel dependen jumlah yang terkecil adalah sebesar 157.118.000.000 dan yang terbesar adalah 542.050.000.000 Hal ini berarti Belanja Daerah Kota Bukittinggi yang menjadi sampel terkecil adalah 157.118.000.000 dan yang terbesar adalah 542.050.000.000. Rata-rata belanja daerah Kota Bukittinggi sebesar 355.995.700.000 dan standar deviasi sebesar 122.279.749.784. Hal ini menunjukkan bahwa Belanja Daerah Kota Bukittinggi secara umum sudah mampu menjalankan tugasnya dengan efektif.

4.2.2 Uji Asumsi Klasik

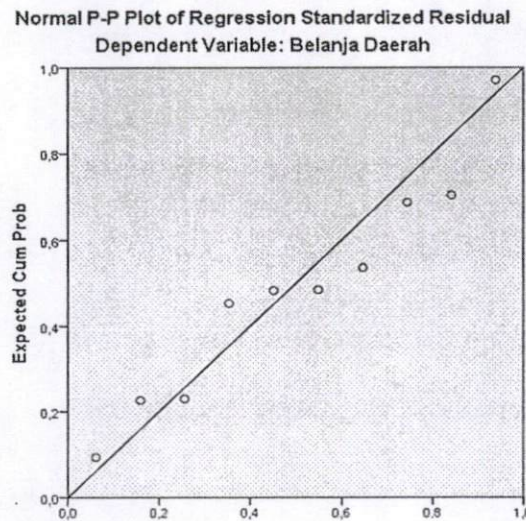
4.2.2.1 Uji Normalitas

Uji Normalitas merupakan pengujian asumsi klasik yang bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi variabel dependen dan independen ataupun keduanya memiliki distribusi normal atau tidak. Kurva yang menggambarkan distribusi normal adalah kurva yang berbentuk simetris. Apabila data terdistribusi normal, maka data akan menyebar mengikuti garis diagonal,

sebaliknya, jika data tidak terdistribusi normal, maka data akan menyebar jauh dari garis diagonal. Hasil uji normalitas ditunjukkan oleh gambar berikut :

Grafik 4.1

Grafik Uji Normalitas Belanja Daerah Kota Bukittinggi



Dari grafik 4.1 maka dapat diambil kesimpulan bahwa data yang menyebar tidak jauh dari garis diagonal dan atau mengikuti arah garis diagonal regresi ini berarti model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Dasar pengambilan keputusan ini didasari oleh pendapat Santoso (2002) yaitu :

- Jika data menyebar di sekitar garis normal dan mengikuti arah diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas
- Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

4.2.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas adalah keadaan dimana pada model regresi ditemukan adanya korelasi yang sempurna atau mendekati sempurna antara variabel independen. Pada model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi yang sempurna atau mendekati sempurna di antara variabel bebas (korelasinya 1 atau mendekati 1). Beberapa metode uji Multikolinearitas yaitu dengan melihat nilai Tolerance dan Inflation Factor (VIF) pada model regresi atau dengan membandingkan nilai koefisien determinasi individual (r^2) dengan nilai determinasi secara serentak (R^2). Untuk mengetahui suatu model regresi bebas dari Multikolinearitas, yaitu mempunyai nilai Variance Inflation Factor (VIF) kurang dari 10 dan mempunyai angka Tolerance Lebih dari 0,1.

Berdasarkan output pada tabel 4.7, dapat dilihat bahwa nilai Tolerance masing-masing variabel Independen lebih dari 0,1 dan nilai VIF dari kedua variabel Independen tidak ada yang melebihi angka 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi Multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi ini.

Tabel 4.7

Uji Multikolinearitas Seluruh Variabel Independen

(Variabel Dependen : Belanja Daerah)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-5139979734	21802144617		-,236	,820		
Pendapatan Asli Daerah	2,701	1,437	,306	1,880	,102	,122	8,215
Dana Alokasi Umum	,980	,229	,696	4,275	,004	,122	8,215

a. Dependent Variable: Belanja Daerah

4.2.2.3 Uji Autokorelasi

Tabel 4.8

Uji Autokorelasi

(Variabel Dependen : Belanja Daerah)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,989 ^a	,977	,971	20834691121	1,615

- a. Predictors : (Constant), DAU, PAD
- b. Dependent Variable : BD

Pengujian ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat adanya hubungan antara data (observasi) satu dengan data yang lainnya dalam satu variabel.

Cara untuk mendeteksi adanya Autokorelasi adalah dengan menggunakan *Durbin Watson (D_W) Statistik*. Model regresi linear berganda dikatakan bebas dari gejala Autokorelasi apabila nilai Durbin Watson berkisar antara 1,55 sampai 2,46 (untuk $n < 15$)

Berdasarkan hasil persamaan regresi nilai statistik *Durbin Watson* dalam penelitian ini adalah 1.615. Hal ini menunjukkan bahwa nilai *Durbin Watson* terletak diantara 1,55 sampai 2,46. Karena nilai DW berkisar antara 1,55 sampai 2,46 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah *Autokorelasi* dalam model regresi linier berganda ini.

4.2.2.4 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan yang lain.

Untuk mendeteksi apakah terdapat gejala Heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menganalisis penyebaran titik-titik yang terdapat pada *scatterplot* model regresi. Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka telah terjadi Heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi Heteroskedastisitas. (Lihat pada grafik 4.2) dari hasil pengujian ini terdapat pola tertentu yang teratur yang tidak bergelombang, tidak melebar dan tidak menyempit, maka disimpulkan bahwa tidak terjadi Heteroskedastisitas.

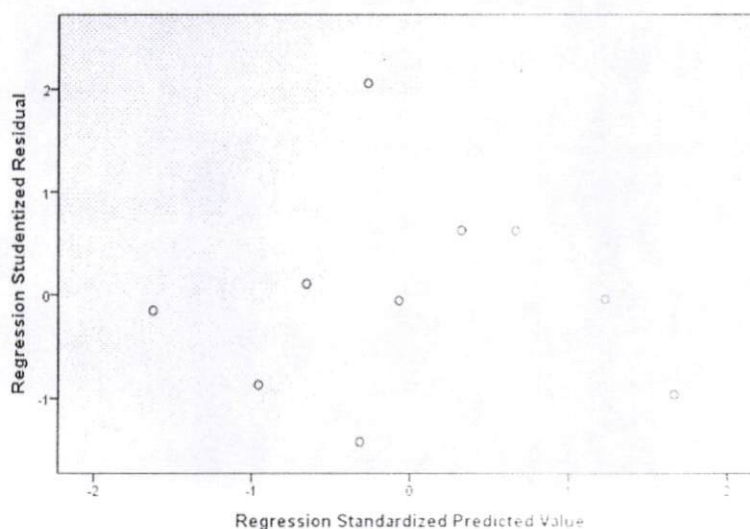
Setelah pengujian asumsi klasik dilakukan maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Belanja Daerah (BD) tidak memenuhi / bebas dari asumsi klasik.

Grafik 4.2

Grafik Uji Heteroskedastisitas Belanja Daerah.

Scatterplot

Dependent Variable : BD



4.2.3 Pengujian Hipotesis

Analisis yang selanjutnya dilakukan adalah analisis terhadap hipotesis yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya.

Dalam hal ini analisis terhadap hipotesis dilakukan dengan *Uji T* dan *Uji F*.

4.2.3.1 Uji Signifikansi Parameter (Individual Statistik T)

Analisis yang selanjutnya dilakukan adalah *Uji t*, hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji signifikansi nilai parameter hasil regresi serta melihat kecocokan tanda (hubungan positif atau negatif) antara hipotesis alternatif dan hasil pengujian. Atau dengan kata lain *Uji t* digunakan untuk mengetahui apakah secara parsial PAD dan DAU berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap Belanja Daerah.

Hasil pengujian hipotesis untuk *Uji t* adalah sebagai berikut :

Tabel 4.9
Hasil Regresi Berganda untuk Uji t

Coefficients ^a								
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-5139979734	21802144617		-,236	,820		
	Pendapatan Asli Daerah	2,701	1,437	,306	1,880	,102	,122	8,215
	Dana Alokasi Umum	,980	,229	,696	4,275	,004	,122	8,215

a. Dependent Variable: Belanja Daerah

Kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut :

Ho1 : Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah (BD).

Ha1 : Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah (BD).

Ho2 : Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah (BD).

Ha2 : Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah (BD).

Berdasarkan pengolahan data regresi yang telah dilakukan didapatkan hasil seperti yang terlihat pada tabel 4.10 seperti berikut :

a. Pengujian terhadap PAD.

Dari pengujian *Uji t* diperoleh nilai '*hitung*' untuk variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 1,880 dengan signifikansi 0,102 yang berarti bahwa secara parsial tidak ada pengaruh signifikan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah di Kota Bukittinggi dalam kurun waktu tahun 2005-2014, dengan perbandingan '*tabel*' sebesar 2,365 maka *Ho1 Diterima*.

$T_{hitung} < T_{tabel} (1,880 < 2,365) \text{ dan sig. } (0,102 > 0,05).$

b. Pengujian terhadap DAU.

Dari pengujian *Uji t* diperoleh nilai '*hitung*' untuk variabel Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 4,275 dengan signifikansi 0,004. Hal ini berarti secara Parsial Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah Kota Bukittinggi dalam kurun waktu tahun 2005-2014. dengan perbandingan '*tabel*' sebesar 2,365, maka *Ha2 Diterima*.

$T_{hitung} > T_{tabel} (4,275 > 2,365) \text{ dan sig. } (0,004 < 0,05).$

4.2.3.2 Uji signifikansi Parameter Simultan (Uji Statistik F)

Uji F dilakukan untuk menguji hubungan regresi antara variabel dependen dengan seperangkat variabel independen.

Hipotesis untuk uji F adalah sebagai berikut :

- a. H_0 Diterima dan H_a Ditolak apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$.

(Variabel Independen secara bersama-sama tidak mempengaruhi variabel dependen)

- b. H_a Diterima dan H_0 Ditolak apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$.

(Variabel Independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen).

Hasil pengujian regresi berganda untuk melihat pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 4.10
Hasil Regresi Berganda untuk Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1,315E+23	2	6,577E+22	151,506	,000 ^b
	Residual	3,039E+21	7	4,341E+20		
	Total	1,346E+23	9			

a. Dependent Variable: Belanja Daerah

b. Predictors: (Constant), Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah

Dari pengujian tersebut secara keseluruhan diperoleh hasil seperti yang terlihat dalam tabel, bahwa nilai dari F Hitung adalah sebesar 151,506 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 dan untuk menghitung nilai dari F Tabel digunakanlah perhitungan sebagai berikut :

$df\ 1 = (\text{jumlah variabel} - 1) = 2$ dan $df\ 2 = (n - k - 1)$ atau $10 - 2 - 1 = 2$.

($df\ 1 = 2$), ($df\ 2 = 7$)

Keterangan :

n : jumlah data

k : jumlah variabel independen

Dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05 maka diperoleh F tabel sebesar 4,737. Kesimpulan yang diperoleh adalah $F\ \text{Hitung} > F\ \text{Tabel}$ ($151,506 > 4,737$) dan signifikansi $< 0,05$ ($0,000 < 0,05$).

Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa H_a diterima dan H_o ditolak, Artinya bahwa secara serempak semua variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara seperangkat variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) dengan variabel dependen yaitu Belanja Daerah. Dengan demikian ada pengaruh yang signifikan antara variabel Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara bersama-sama terhadap variabel kinerja keuangan Pemerintah dalam hal ini belanja daerah.

4.2.3.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) menunjukkan sumbangan pengaruh variabel independen terhadap dependen, dan biasanya angka ini diubah kedalam bentuk persentase (Priyatno, 2012). Nilai yang digunakan adalah nilai *Adjusted R Square* Hasil Uji koefisien Determinasi dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.11

Hasil Uji koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,989 ^a	,977	,971	20834691121

a. Predictors : (Constant), DAU, PAD

b. Dependent Variable : BD

Dari tabel 4.11 tersebut dapat dilihat bahwa nilai *Adjusted R Square* adalah sebesar 0,971 atau 97.1%. artinya, variabel independen (PAD dan DAU) memberikan sumbangan pengaruh terhadap variabel dependen (Belanja Daerah) sebesar 97.1% dan sisanya 2.9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi ini.

4.2.4 Hasil Uji Regresi

Analisis regresi linier berganda adalah analisis untuk mengukur pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen (Priyatno, 2012). Persamaan regresi disusun berdasarkan *Unstandardized coefficients*. *Unstandardized coefficients* adalah nilai koefisien yang tidak terstandarisasi atau tidak memiliki patokan dan nilai inilah yang dimasukkan pada persamaan regresi (Priyatno, 2012).

Berikut adalah hasil koefisien dari analisis regresi berganda untuk *persamaan (3.6)* (Hubungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah).

Tabel 4.12
Hasil Uji Regresi
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-5139979734	21802144617		-,236	,820		
Pendapatan Asli Daerah	2,701	1,437	,306	1,880	,102	,122	8,215
Dana Alokasi Umum	,980	,229	,696	4,275	,004	,122	8,215

a. Dependent Variable: Belanja Daerah

Berdasarkan tabel diatas dapat diperoleh model persamaan regresi berganda yang bisa dibentuk sebagai berikut :

$$BD = \alpha + \beta_1 PAD + \beta_2 DAU + \varepsilon$$

$$BD = -5.139.979.734 + (2,701)PAD + (0,980)DAU + \varepsilon$$

$$Y' = -5.139.979.734 + (2,701)X_1 + (0,980)X_2 + \varepsilon$$

Arti dari angka-angka pada persamaan di atas adalah sebagai berikut :

- Nilai konstanta (α) adalah -5.139.979.734 ; artinya, jika PAD dan DAU bernilai 0 (nol), maka Belanja Daerah bernilai negatif yaitu – 5.139.979.734.
- Nilai koefisien regresi variabel Pendapatan Asli Daerah bernilai positif, yaitu 2,701 ; ini dapat diartikan bahwa setiap pertambahan Rp. 1 variabel PAD, maka akan meningkatkan variabel Belanja Daerah sebesar Rp. 2,701.

Koefisien bernilai positif, artinya terjadi hubungan positif antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Belanja Daerah, semakin naik Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin naik Belanja Daerah.

- Nilai koefisien regresi variabel Dana Alokasi Umum bernilai positif, yaitu 0,980 ; ini dapat diartikan bahwa setiap pertambahan Rp. 1 variabel DAU, maka akan meningkatkan variabel Belanja Daerah sebesar Rp. 0,980.

Koefisien bernilai positif, artinya terjadi hubungan positif antara Dana Alokasi Umum (DAU) dengan belanja daerah, semakin naik Dana Alokasi Umum (DAU) semakin naik Belanja Daerah.

Dari model regresi berganda yang diperoleh dari hasil pengujian akan dijelaskan pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen yaitu Belanja Daerah.

a. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah

Hasil pengujian mengenai variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 2,701 pada tingkat signifikansi 0,102 ($0,102 > 0,05$). penelitian ini berhasil membuktikan bahwa variabel ini berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Belanja Daerah Kota Bukittinggi dari tahun 2005-2014.

Walaupun tiap kenaikan Pendapatan Asli Daerah sebanyak Rp.1 menyebabkan Belanja Daerah meningkat sebesar Rp. 2,701 namun tidak bisa memberikan pengaruh yang signifikan untuk meningkatkan Belanja

Daerah dengan asumsi *ceteris paribus*, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Prakoso (2004) yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah di Provinsi Jawa Tengah dan DIY.

Hal ini sesuai dengan teori Peacock dan Wiseman (1961) dimana teori mereka didasarkan pada suatu pandangan bahwa pemerintah senantiasa berusaha memperbesar pengeluaran sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar guna membiayai pengeluaran pemerintah yang juga semakin besar. Dimana pajak merupakan salah satu bagian dari PAD yang berpengaruh paling dominan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber penting bagi sebuah daerah dalam memenuhi belanjanya dan PAD ini juga dapat menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah. Apabila suatu daerah dapat membiayai belanja daerahnya sendiri terutama dari PAD maka daerah tersebut dapat dikatakan sudah mandiri. Namun, dalam hal ini PAD Kota Bukittinggi dari Tahun 2005-2014 dapat dikatakan belum mandiri. Hal ini mengindikasikan bahwa terjadi *Flypaper Effect* pada Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi. Kecilnya proporsi PAD terhadap belanja daerah mengindikasikan daerah tersebut belum memaksimalkan pemanfaatan sumber daya alam (SDA) sebaik-baiknya. Ini dapat terjadi dikarenakan adanya kecenderungan yang berlebih terhadap pengharapan transfer dana dari pemerintah pusat sehingga akan melemahkan kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhannya sendiri.

b. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah

Hasil Pengujian yang dilakukan mengenai pengaruh variabel Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah dapat dilihat pada tabel 4.12 diatas. Berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa Dana Alokasi Umum memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,980 dengan tingkat signifikan sebesar 0.004 ($0,004 < 0,05$). hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa variabel Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Daerah Kota Bukittinggi. Koefisien regresi Dana Alokasi Umum (DAU) yang bertanda 0.980 mengandung arti bahwa setiap kenaikan Dana Alokasi Umum sebesar Rp. 1 akan meningkatkan Belanja Daerah sebesar Rp. 0,980. Dari hasil penelitian ini juga menyimpulkan bahwa semakin besar Dana Alokasi Umum yang diperoleh maka akan menyebabkan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2005-2014 semakin besar.

Hal ini sejalan dengan penelitian Maemunah (2006) yang menemukan bahwa secara parsial Dana Alokasi Umum mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah di Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera. Begitu juga dengan penelitian Rahmawati (2010) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh secara signifikan terhadap belanja daerah di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

DAU merupakan salah satu sumber penting bagi sebuah daerah dalam memenuhi belanjanya dan DAU ini dapat menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah. Apabila DAU yang diterima daerah lebih kecil daripada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dihasilkan suatu daerah maka daerah tersebut dikatakan sudah mandiri. Begitu juga sebaliknya,

apabila DAU yang diterima lebih besar daripada DAU yang dihasilkan suatu daerah maka dikatakan daerah tersebut belumlah mandiri. Ini disebabkan karena daerah tersebut masih bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat untuk membiayai belanja daerah.

Dalam hal ini Kota Bukittinggi dapat dikatakan belum mandiri karena Dana Alokasi Umum Kota Bukittinggi yang berasal dari Pemerintah Pusat lebih besar dari Pendapatan Asli Daerah yang dihasilkan oleh Kota Bukittinggi itu sendiri pada tahun 2005-2014. Kecendrungan pengaruh Dana Alokasi Umum inilah dalam jangka panjang dapat mengganggu kemampuan daerah dalam membiayai pengeluaran khususnya pengelolaan sumber daya sendiri sehingga tujuan utama dari Dana Alokasi Umum untuk menghilangkan kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) akan tetap ada sehingga keadaan tersebut mengindikasikan terjadinya *flypaper effect*.

c. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah

Hasil pengujian mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah menunjukkan koefisien sebesar 151,506 (F hitung) dengan tingkat signifikansi sebesar 0,00. Sementara dari hasil perhitungan diperoleh F tabel sebesar 4,737. Kesimpulan yang diperoleh $F \text{ hitung} > F \text{ tabel}$ ($151,506 > 4,737$) dan signifikansi $< 0,05$ ($0,00 < 0,05$). Maka Hipotesis H_a diterima dan H_0 ditolak. Artinya, secara serempak variabel Pendapatan Asli Daerah dan

Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap variabel Belanja Daerah.

Disisi lain pengujian yang dilakukan juga menunjukkan bahwa sumbangan variabel independen terhadap dependen adalah sebesar 97,1%. artinya, variabel independen (Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum) memberikan sumbangan pengaruh terhadap variabel dependen (Belanja Daerah) sebesar 97,1%.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang telah dilakukan Rahmawati (2010) dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, besarnya belanja daerah selama ini sangat ditentukan oleh faktor Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum. Begitu juga dengan penelitian Maemunah (2006) dari penelitian yang dihasilkan kesimpulan yang diperoleh adalah baik secara terpisah maupun bersama-sama kedua variabel yaitu Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum mempunyai pengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera.

Meskipun demikian hasil tersebut juga membuktikan telah terjadi *Flypaper Effect* pada kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi. Dimana Pemda dalam merespon belanjanya lebih banyak dengan menggunakan dana transfer (grants) ketimbang kemampuan daerah sendiri yaitu Pendapatan Asli Daerah. Implikasi dari *flypaper effect*

tersebut akan membuat kecendrungan daerah untuk menanti bantuan dari pusat lebih besar dibanding usaha daerah dalam mengelola kekayaan daerah sendiri, akibatnya celah kepincangan fiskal akan tetap ada sejalan dengan ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat yang akan terus ada. Hal ini sangatlah bertolak belakang dengan apa yang diharapkan pemerintah pusat dimana dengan diselenggarakannya otonomi daerah diharapkan pemerintah daerah mampu memanfaatkan semua potensi yang dimiliki daerah, baik potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia.

Secara umum semakin tinggi derajat kemandirian daerah menunjukkan bahwa daerah tersebut semakin mampu membiayai pengeluarannya sendiri tanpa bantuan pemerintah pusat selain itu semakin tinggi kemampuan daerah untuk membiayai pengeluarannya sendiri melalui Pendapatan Asli Daerah-nya sendiri akan menunjukkan kinerja keuangan yang positif. Namun pada kenyataannya yang terjadi adalah besaran kontribusi variabel DAU lebih besar dibandingkan dengan variabel PAD, hal ini menyebabkan daerah lebih dipengaruhi oleh DAU daripada PAD-nya sendiri dalam hal keputusan belanja daerahnya. Hal ini tentu saja tidak sejalan dengan konsep otonomi daerah yang telah dilaksanakan dan dalam jangka panjang keadaan ini akan menyebabkan penurunan kemandirian daerah akibat ketergantungan pemerintah daerah yang masih sangat besar terhadap pemerintah pusat.

Bukittinggi yang memiliki potensi untuk meningkatkan PAD-nya terutama pada pungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang seharusnya dapat lebih mandiri dalam membiayai belanja daerahnya, sehingga *Flypaper effect* yang

berpotensi terjadi dapat diminimalisir. Di saat transfer DAU yang diperoleh besar, maka pemerintah daerah berusaha agar pada periode berikutnya DAU yang diperoleh tetap sama. Hal ini menyebabkan PAD tidak berpengaruh terhadap belanja daerah yang menyebabkan terjadinya *Flypaper Effect* atau dapat dikatakan bahwa pengaruh DAU terhadap belanja daerah lebih besar daripada pengaruh PAD terhadap belanja daerah. Dengan kata lain, pemberian DAU yang seharusnya menjadi pendorong untuk peningkatan kemandirian daerah, justru direspon berbeda oleh daerah. Daerah tidak menjadi lebih mandiri, malah cenderung menjadikan transfer pemerintah pusat sebagai pendapatan utamanya dalam menjalankan roda pemerintahan sekaligus sebagai sumber utama dalam hal pembiayaan pembangunan daerah. Selain itu pemerintah daerah selama ini sibuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan cara menaikkan atau menggalakkan pajak yang justru akan semakin membebani masyarakat. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang baik harus tetap memperhatikan pemenuhan kebutuhan publik.

Berdasarkan pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini tidak mendukung sepenuhnya hipotesis yang telah ditetapkan dalam bab dua (2) bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) mempengaruhi Belanja Daerah Pemerintah Kota Bukittinggi.

Pada bab ini sudah dijelaskan tentang hasil dari pengolahan data yang didapat oleh peneliti dari Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPKAD) Kota Bukittinggi. Dan bab selanjutnya akan menjelaskan kesimpulan dan saran dari peneliti.

BAB V

PENUTUP

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh tentang bagaimana hubungan variabel independen yaitu; Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap variabel dependen; yakni Belanja Daerah Kota Bukittinggi. Adapun sampel penelitian yang digunakan adalah Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah rentang tahun 2005-2014, yang diperoleh dari kantor Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Bukittinggi.

Selanjutnya, bab ini akan menguraikan kesimpulan dan saran yang diambil oleh peneliti dari hasil pengolahan data yang telah dilakukan peneliti yakni sebagai berikut;

5.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah. Artinya Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum mencukupi untuk membiayai kebutuhan Belanja Daerah, hal ini dikarenakan besarnya ketergantungan penerimaan daerah yang berasal dari dana transfer, sehingga menjadikan sumber-sumber penerimaan yang berasal dari daerah tidak terlalu diperhatikan. Dan juga membuktikan bahwa telah terjadi *flypaper effect* dimana kebijakan belanja daerah lebih didominasi oleh jumlah Dana Alokasi Umum daripada Pendapatan Asli Daerah. Ini juga

menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bukittinggi lebih cenderung untuk menunggu dana transfer dari Pemerintah Pusat, dan belum secara optimal untuk mengelola sumber-sumber kekayaan alam yang bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Bukittinggi.

2. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat ketergantungan sangat erat antara transfer dari pemerintah pusat dengan Belanja Pemerintah Daerah. Dan juga menyatakan bahwa pengurangan/penurunan jumlah transfer Pemerintah Pusat akan menyebabkan penurunan pengeluaran daerah dan begitu juga sebaliknya peningkatan alokasi transfer akan diikuti dengan pengeluaran yang lebih tinggi.
3. Untuk pengujian secara bersama-sama (menggunakan Uji F dan R^2) menunjukkan bahwa Variabel independen yaitu PAD dan DAU berpengaruh terhadap Belanja Daerah sebesar 97,1%. Sisanya sebesar 2,9% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain.
4. Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi belum cukup mampu membiayai kebutuhan Belanja Daerah Pemerintah Daerah. Kenaikan dana transfer tiap tahunnya menunjukkan bahwa Kota Bukittinggi masih bergantung pada aliran dana dari pusat, meskipun Pendapatan Asli Daerah juga mengalami kenaikan

namun Dana Alokasi Umum masih memiliki kontribusi besar terhadap kebutuhan Belanja Pemerintah Daerah.

5.2 Keterbatasan Penelitian

1. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini terbatas pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Peneliti belum menguji variabel independen lain yang mungkin berpengaruh terhadap Belanja Daerah.
2. Periode penelitian ini dibatasi hanya dari tahun 2005 sampai 2014.

5.3 Saran

1. Untuk meningkatkan Belanja Daerah maka Pemerintah Daerah diharapkan bisa terus menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi, demikian juga Pemerintah Daerah diharapkan tidak terlalu mengupayakan untuk bisa terus menarik Dana Alokasi Umum (DAU) semaksimal mungkin. Sebaliknya pemerintah daerah hendaknya lebih *concern* terhadap sumber-sumber pendapatan yang ada di daerah sendiri demi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah seperti diantaranya,
 - penggunaan bangunan milik pemerintah yang tidak terpakai guna membuat lahan parkir baru yang lebih modern dan terkelola dengan baik.
 - pembebasan lahan guna menciptakan objek wisata baru yang berpotensi mendatangkan pendapatan berupa retribusi.

- Mempermudah perizinan mendirikan bangunan bagi siapapun yang berinvestasi di Bukittinggi (Hotel, Restoran, Wisata Rekreasi dan lain sebagainya)
2. Terkait dengan hasil analisis mengenai ketergantungan Pemerintah Daerah yang besar terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) dibanding dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), jika pemerintah daerah mendukung suksesnya program otonomi daerah maka seharusnya kemandirian daerah harus dapat diwujudkan. Kemandirian daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah harus ditingkatkan sehingga pada akhirnya faktor yang paling dominan berpengaruh terhadap Belanja Daerah nantinya adalah Pendapatan Asli Daerah itu sendiri, bukan bantuan/transfer dari Pemerintah Pusat lagi.
 3. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk memperbanyak sumber yang digunakan agar hasilnya lebih representatif terhadap populasi yang dipilih. Dan untuk lebih menguatkan hasil dari penelitian sebaiknya dapat mengambil sampel lebih dari 10 (tahun).
 4. Variabel yang digunakan dalam penelitian yang akan datang diharapkan lebih lengkap dan bervariasi dengan menambah variabel independen lain baik ukuran-ukuran atau jenis-jenis penerimaan Pemerintah Daerah lainnya, maupun variabel non-keuangan seperti kebijakan pemerintah, kondisi makro-ekonomi dan lain sebagainya yang kemungkinan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah
 5. Penelitian ini juga diharapkan juga mampu mendorong pemerintah daerah untuk menciptakan suasana kondusif yang akan memunculkan peluang-

peluang usaha baru dan merangsang pertumbuhan sektor riil. Suasana yang kondusif akan sangat berpengaruh dalam menarik para investor untuk datang dan menanamkan modal di daerah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizawati. 2012. *Analisis Flypaper Effect pada Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan*. Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi, Hal 21-30
- Arif, Bahtiar. 2002. *Akuntansi Pemerintahan*. Penerbit. Salemba 4 : Jakarta.
- Bastian, Indra. 2002. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit. Salemba 4 : Jakarta.
-, 2006. *Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia*, Penerbit. Salemba 4 : Jakarta.
- Bambang Prakosa, Kesit. 2004. *Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah*. Penerbit. Simposium Nasional Akuntansi IX. Padang.
- Darise, Nurlan. 2008. *Akuntansi Sektor Keuangan Daerah*. Penerbit. PT Indeks : Jakarta
- Ghozali, Imam, Arifin Sabeni. 1997. *Pokok-Pokok Akuntansi Pemerintahan*. Edisi 4. Penerbit PT. Indeks : Jakarta.
-, 2005. *Metodologi Penelitian - Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Penerbit USU Press : Medan.
- Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*. Penerbit. Salemba 4 : Jakarta.
-, 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*, Penerbit. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, Yogyakarta.
-, 2009. *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah edisi 3*. Penerbit. Salemba 4 : Jakarta.
- Husein, Umar. 2003. *Metodologi Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Penerbit : Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Indah Rahmawati, Nur. 2010. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Alokasi Belanja Daerah Studi pada Pemerintah Kab/Kota di Jawa Tengah*. Semarang : Universitas Diponegoro.
- Isdijoso, Brahmantio, 2002. *Kajian Ekonomi dan Keuangan Vol. 6 No. 1 : Analisis Kebijakan Fiskal Pada Era Otonomi Daerah (Studi Kasus : Sektor Pendidikan di Kota Surakarta)*. Surakarta.
- Jonathan, Sarwono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Penerbit : Graha Ilmu. Yogyakarta.

- Kawedar, Warsito, Abdul Rahman, dan Sri Handayani. 2007. *Akuntansi Sektor Publik : Pendekatan Penganggaran Daerah dan Akuntansi Keuangan Daerah*. Penerbit. UNDIP : Semarang.
- Kuncoro, Mudrajad, 2001. Metode Kuantitatif. Yogyakarta. *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*, Penerbit. PT. Gramedia Pustaka Utama : Jakarta.
-, 2004. Otonomi & Pembangunan Daerah Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang. Penerbit. Erlangga : Jakarta.
- Maimunah, Mutiara. 2006. *Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Prediksi Belanja Daerah pada Kab/Kota di Pulau Sumatera*. Simposium Nasional Akuntansi IX. Padang.
- Mardiasmo. 1995. *Perpajakan : Edisi ke-3*. Andi Offset. Yogyakarta
-, 2002. *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. Andi. Yogyakarta.
- Puspita Sari, Noni dan Idhar Yahya. 2009. *Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Langsung*. Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Pramuka, B.A. 2010. *Flypaper Effect pada Pengeluaran Pemerintah Daerah di Jawa*. Jurnal Ekonomi Pembangunan, Hal 1-12
- Pratiwi, Novi. 2007. *Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Prediksi Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Indonesia*. Skripsi Sarjana (Dipublikasikan).
- Priyatno, Duwi. 2009. "5 Jam Olah Data dengan SPSS 17". Penerbit. ANDI : Yogyakarta.
-, 2012. "Cara Kilat Belajar Analisis Data dengan SPSS 20". Edisi 1. Penerbit. ANDI : Yogyakarta.
- Setiawan, Anjar. 2010. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah Studi pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah*. Semarang : Universitas Diponegoro.
- Sidik, Machfud, B Raksasa Mahi, Robert Simanjuntak, dan Bambang Brodjonegoro. 2002. *Dana Alokasi Umum – Konsep, Hambatan dan Prospek di Era Otonomi Daerah*. Penerbit. Kompas : Jakarta
- Santoso, Singgih. 2002. *Buku Latihan SPSS untuk Multivariat*. Penerbit. Elex Media Komputer : Jakarta.
- Sekaran, Uma. 2007. *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sukriy dan Halim Abdullah (c). 2004. *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah Studi*

pada Kab/Kota di Jawa dan Bali. Simposium Nasional Akuntansi VI. Surabaya.

Suliyanto, 2011. *Ekonometrika Terapan: Teori dan Aplikasi dengan SPSS*. Andi : Yogyakarta.

Triwidodo, Pambudi. 2007. Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Bali. Skripsi Sarjana (Dipublikasikan). Fakultas Ekonomi UII : Yogyakarta.

Turnbull, G.K. 1998. *The Overspending and Flypaper Effect of Fiscal Illusion : Theory and Empirical Evidence*. Journal of Urban Economics, 44 (1), Juli : 1-26.

Zuhri, Syaifuddin. 2001. *Metodologi Penelitian*. Penerbit. Grasindo : Jakarta

Lembaran Negara Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah*.

-----, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.

-----, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah*.

-----, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara*.

-----, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah*.

-----, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.

-----, *Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 (Perubahan atas Undang-Undang No 32 Tahun 2004) tentang Pemerintahan Daerah*.

-----, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Perubahan kedua atas Undang-Undang No 32 Tahun 2004) tentang Pemerintahan Daerah*.

<http://www/bpkp.go.id>

<http://www/bpkp.depkeu.go.id/jurnalakuntansipemerintah>

Realisasi APBD Tahun 2005-2014 Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi dalam www.djpk.depkeu.go.id.

Lampiran Output SPSS

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Belanja Daerah	3,56E+11	1,223E+11	10
Pendapatan Asli Daerah	39523800000	13857156874	10
Dana Alokasi Umum	2,60E+11	86849091111	10

Correlations

		Belanja Daerah	Pendapatan Asli Daerah	Dana Alokasi Umum
Pearson Correlation	Belanja Daerah	1,000	,958	,983
	Pendapatan Asli Daerah	,958	1,000	,937
	Dana Alokasi Umum	,983	,937	1,000
Sig. (1-tailed)	Belanja Daerah		,000	,000
	Pendapatan Asli Daerah	,000		,000
	Dana Alokasi Umum	,000	,000	
N	Belanja Daerah	10	10	10
	Pendapatan Asli Daerah	10	10	10
	Dana Alokasi Umum	10	10	10

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah ^b		Enter

a. Dependent Variable: Belanja Daerah

b. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,989 ^a	,977	,971	20834691121	1,615

a. Predictors: (Constant), Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah

b. Dependent Variable: Belanja Daerah

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1,315E+23	2	6,577E+22	151,506	,000 ^b
	Residual	3,039E+21	7	4,341E+20		
	Total	1,346E+23	9			

a. Dependent Variable: Belanja Daerah

b. Predictors: (Constant), Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Belanja Daerah
N		10
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	3,56E+11
	Std. Deviation	1,223E+11
Most Extreme Differences	Absolute	,104
	Positive	,104
	Negative	-,087
Kolmogorov-Smirnov Z		,330
Asymp. Sig. (2-tailed)		1,000

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

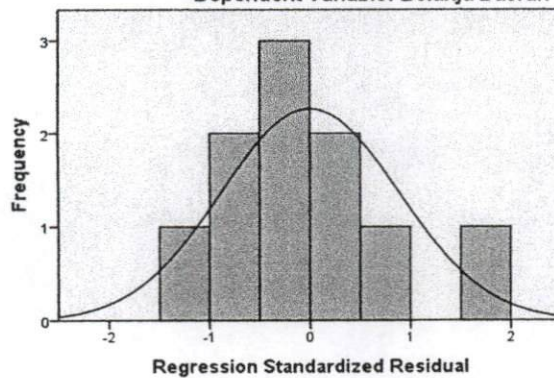
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-5139979734	21802144617		-,236	,820		
	Pendapatan Asli Daerah	2,701	1,437	,306	1,880	,102	,122	8,215
	Dana Alokasi Umum	,980	,229	,696	4,275	,004	,122	8,215

a. Dependent Variable: Belanja Daerah

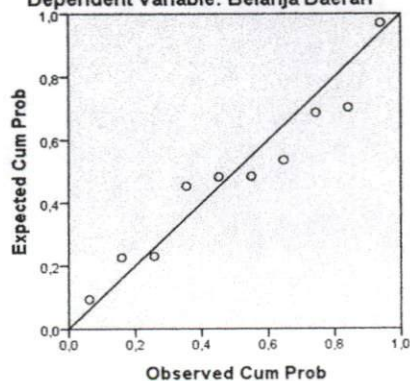
Histogram

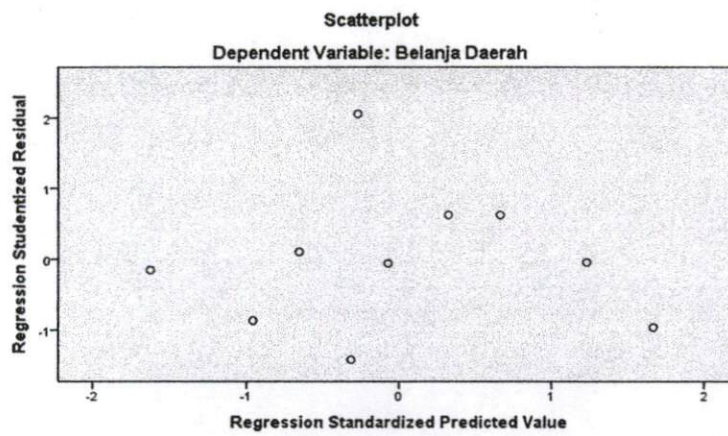
Dependent Variable: Belanja Daerah



Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Belanja Daerah





Pemerintah Kota Bukittinggi

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2005

Kode	Uraian	Jumlah (Rp.)		%
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	
1	Pendapatan Daerah	160,621,011,897	162,515,316,156	101.18
11	Pendapatan Asli Daerah	21,963,037,897	19,320,632,546	87.97
1101	Pajak Daerah	5,086,180,389	5,673,160,642	111.54
1102	Retribusi Daerah	12,050,464,779	9,619,913,471	79.83
1103	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1,257,960,729	810,985,729	64.47
1104	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	3,568,432,000	3,216,572,704	90.14
12	Dana Perimbangan	135,548,000,000	140,457,618,983	103.62
1201	Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam	7,300,000,000	10,915,568,234	149.53
1202	Dana Alokasi Umum (DAU)	114,818,000,000	114,818,000,000	100.00
1203	Dana Alokasi Khusus (DAK)	9,280,000,000	9,555,000,000	102.96
1204	Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Dari Propinsi	4,150,000,000	5,169,050,749	124.56
13	Lain-Lain Pendapatan yang Sah	3,109,974,000	2,737,064,627	88.01
1301	Bantuan Dana Penyeimbang Dari Pemerintah	3,109,974,000	2,737,064,627	88.01
	Jumlah Pendapatan	160,621,011,897	162,515,316,156	101.18
2	Belanja	179,315,051,768	157,118,503,927	87.62
21	Aparatur Daerah	117,716,353,693	107,479,821,938	91.30
211	Belanja Administrasi Umum	100,794,010,343	93,391,310,851	92.66
21101	Belanja Pegawai	89,016,355,143	83,692,723,985	94.02
21102	Belanja Barang dan Jasa	6,409,926,000	5,311,990,573	82.87

21103	Belanja Perjalanan Dinas	2,884,255,800	2,073,323,058	71.88
21104	Belanja Pemeliharaan	2,483,473,400	2,313,273,235	93.15
212	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	5,804,474,350	4,247,517,559	73.18
21201	Belanja Pegawai	1,837,125,350	1,325,576,121	72.15
21202	Belanja Barang dan Jasa	2,924,777,800	1,907,089,528	65.20
21203	Belanja Perjalanan Dinas	38,500,000	25,700,000	66.75
21204	Belanja Pemeliharaan	1,004,071,550	989,151,910	98.51
213	Belanja Modal	11,117,869,000	9,840,993,528	88.52
22	Pelayanan Publik	61,594,698,075	49,638,681,989	80.58
221	Belanja Administrasi Umum	11,114,962,625	10,438,531,261	93.66
22101	Belanja Pegawai	7,326,827,625	6,993,568,738	95.45
22102	Belanja Barang dan Jasa	3,276,803,000	2,992,902,472	91.34
22103	Belanja Pemeliharaan	541,332,000	452,060,051	83.51
222	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	17,106,297,550	13,314,381,458	77.83
22201	Belanja Pegawai	2,121,561,500	1,555,068,450	73.30
22202	Belanja Barang dan Jasa	6,246,789,300	4,629,196,327	74.11
22203	Belanja Perjalanan Dinas	969,330,000	679,447,319	70.09
22204	Belanja Pemeliharaan	7,768,616,750	6,450,669,362	83.03
223	Belanja Modal	19,575,097,900	15,285,565,870	78.09
224	Belanja Bantuan Keuangan	11,776,340,000	9,254,392,151	82.83
225	Belanja Tidak Tersangka	1,996,000,000	845,811,249	42.38
	Jumlah Belanja	179,315,051,768	157,118,503,927	87.62
	Surplus / (Defisit)	(18,694,039,871)	5,396,812,229	(28.87)
3	Pembiayaan	18,694,039,871	5,396,812,229	(28.87)
31	Penerimaan Daerah	19,889,961,944	19,943,844,333	100.27
32	Pengeluaran Daerah	1,195,922,073	25,340,656,562	2118.92

Pemerintah Kota Bukittinggi

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2006

Kode	Uraian	Jumlah (Rp.)		%
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	
1	Pendapatan	249,374,750,049	247,440,847,087	99.22
11	Pendapatan Asli Daerah	27,746,413,600	24,387,363,460	87.93
1101	Pajak Daerah	6,172,300,600	7,157,992,140	115.97
1102	Retribusi Daerah	14,019,429,000	10,131,799,732	72.27
1103	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1,481,225,000	751,997,078	50.77
1104	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	6,073,459,000	6,335,574,510	104.65
12	Dana Perimbangan	219,828,597,449	222,928,163,627	101.41
1201	Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam	10,228,597,449	13,071,575,647	127.79
1202	Dana Alokasi Umum (DAU)	183,130,000,000	183,130,000,000	100.00
1203	Dana Alokasi Khusus (DAK)	17,320,000,000	17,320,000,000	100.00
1204	Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Dari Propinsi	9,150,000,000	9,406,587,980	102.80
13	Lain-Lain Pendapatan yang Sah	1,799,739,000	115,320,000	6.41
1301	Bantuan Dana Penyeimbang Dari Pemerintah	1,799,739,000	115,320,000	6.41
	Jumlah Pendapatan	249,374,750,049	247,440,847,087	99.22
2	Belanja	271,989,484,538	224,543,362,613	82.56
21	Aparatur Daerah	154,429,547,989	136,063,257,154	88.11
211	Belanja Administrasi Umum	126,519,012,889	115,424,203,430	91.23
21101	Belanja Pegawai	104,831,124,339	96,491,451,488	92.04
21102	Belanja Barang dan Jasa	15,901,860,050	14,133,379,059	88.88

21103	Belanja Perjalanan Dinas	3,304,350,000	2,544,589,380	77.01
21104	Belanja Pemeliharaan	2,481,678,500	2,254,783,503	90.86
212	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	7,460,190,100	3,602,457,019	48.29
21201	Belanja Pegawai	953,060,000	670,719,800	70.38
21202	Belanja Barang dan Jasa	6,196,140,100	2,725,653,969	43.99
21203	Belanja Perjalanan Dinas	201,250,000	104,941,500	52.14
21204	Belanja Pemeliharaan	109,740,000	101,141,750	92.16
213	Belanja Modal	20,450,345,000	17,036,596,705	83.31
22	Pelayanan Publik	117,559,936,549	88,480,105,459	75.26
221	Belanja Administrasi Umum	20,274,147,000	16,951,144,986	83.61
22101	Belanja Pegawai	13,236,490,000	11,445,073,553	86.47
22102	Belanja Barang dan Jasa	5,141,541,000	4,043,182,579	78.64
22103	Belanja Pemeliharaan	1,527,000,000	1,157,274,281	75.79
222	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	20,793,448,100	16,733,677,540	80.48
22201	Belanja Pegawai	1,388,427,000	868,860,800	62.58
22202	Belanja Barang dan Jasa	9,038,335,600	6,265,050,023	69.32
22203	Belanja Perjalanan Dinas	504,030,000	245,650,318	48.74
22204	Belanja Pemeliharaan	9,862,655,500	9,354,116,399	94.84
223	Belanja Modal	51,084,507,000	42,901,341,933	83.98
224	Belanja Bantuan Keuangan	21,537,500,000	11,350,190,150	52.70
225	Belanja Tidak Tersangka	3,870,334,449	543,750,850	14.05
	Jumlah Belanja	271,989,484,538	224,543,362,613	82.56
	Surplus / (Defisit)	(22,614,734,489)	(22,897,484,474)	(100.25)
3	Pembiayaan	22,614,734,489	22,897,484,474	(100.25)
31	Penerimaan Daerah	24,114,734,489	24,184,020,272	100.29
32	Pengeluaran Daerah	1,500,000,000	47,081,504,746	3138.77

Pemerintah Kota Bukittinggi

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2007

Kode	Uraian	Jumlah (Rp.)		%
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	
1	Pendapatan Daerah	294,888,982,854	295,060,241,230	0.06
11	Pendapatan Asli Daerah	26,219,038,639	27,774,996,744	5,93
1101	Pajak Daerah	6,703,646,600	7,266,492,541	8.40
1102	Retribusi Daerah	12,194,268,560	9,352,341,520	(23.31)
1103	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1,030,000,000	794,879,970	(22.83)
1104	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	6,291,123,479	10,361,282,713	64.70
12	Pendapatan Transfer	267,455,124,215	265,542,978,132	(0,71)
121	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	256,939,838,540	254,191,358	(1.07)
12101	Bagi Hasil Pajak	16,085,167,206	14,349,927,593	(10.79)
12102	Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	1,413,671,334	873,630,463	(38.20)
12103	Dana Alokasi Umum (DAU)	211,433,000,000	211,433,000,000	-
12104	Dana Alokasi Khusus (DAK)	28,008,000,000	27,534,800,000	(1.69)
122	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	5,000,000,000	5,000,000,000	-
123	Transfer Pemerintah Provinsi	5,515,285,675	6,351,620,076	15.16
12301	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	4,650,000,000	5,486,334,401	17,99
12302	Bantuan Keuangan Dari Provinsi	865,285,675	865,285,675	-
13	Lain-Lain Pendapatan yang Sah	1,214,820,000	1,742,266,354	43.42
1301	Pendapatan Hibah	22,000,000	22,000,000	-

1302	Pendapatan Dana Darurat	92,820,000	92,820,000	-
1303	Bantuan Keuangan dari Pemerintah	1,100,000,000	1,627,446,354	47.95
	Jumlah Pendapatan	294,888,982,854	295,060,241,230	0.06
2	Belanja Daerah	341,849,908,094	278,952,128,714	(18.40)
21	Belanja Operasi	235,751,880,920	189,982,782,000	(19.41)
2101	Belanja Pegawai	161,553,844,876	137,162,782,000	(15.10)
2102	Belanja Barang dan Jasa	51,625,716,044	37,944,028,099	(26.50)
2103	Belanja Hibah	6,500,000,000	6,500,000,000	-
2104	Belanja Bantuan Sosial	13,372,320,000	8,079,971,894	(39.61)
2105	Belanja Bantuan Khusus	2,700,000,000	300,000,000	(88.89)
22	Belanja Modal	101,971,409,697	87,745,222,614	(13.95)
2201	Belanja Modal Tanah	10,376,784,000	8,588,500,000	(17.23)
2202	Belanja Peralatan dan Mesin	213,234,245,125	17,697,517,008	(17.01)
2203	Belanja Gedung dan Peralatan	34,961,128,487	28,948,983,973	(17.20)
2204	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	31,032,945,435	28,388,831,608	(8.52)
2205	Belanja Aset Tetap Lainnya	2,722,048,350	2,607,377,900	(4.21)
2206	Belanja Aset Lainnya	1,554,258,300	1,514,012,125	(2.59)
23	Belanja Tidak Terduga	4,126,617,477	1,224,124,100	(70.34)
	Jumlah Belanja	341,849,908,094	278,952,128,714	(18.40)
	Surplus / (Defisit)	(46,960,925,240)	16,108,112,516	(134.30)
3	Pembiayaan	46,960,925,240	45,415,632,784	(3.29)
31	Penerimaan Daerah	48,460,925,240	46,436,560,757	(4.18)
3101	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	45,820,672,356	45,820,412,355	-
3102	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang	456,225,000	-	(100)

	Dipisahkan			
3103	Penerimaan Piutang Daerah	2,184,027,884	616,148,402	(71.79)
32	Pengeluaran Daerah	1,500,000,000	1,020,927,973	(31.94)
3201	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1,000,000,000	1,000,000,000	-
3202	Pembayaran Pokok Utang	500,000,000	-	(100)
3203	Pembayaran Utang Perhitungan Pihak Ketiga	-	20,927,973	100
33	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Berkenaan	-	61,523,745,300	100

Pemerintah Kota Bukittinggi

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2008

Kode	Uraian	Jumlah (Rp.)		%
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	
1	Pendapatan	321,573,402,536	326,212,067,289	1.44
11	Pendapatan Asli Daerah	27,690,611,668	33,828,542,849	22,17
1101	Pajak Daerah	7,648,500,000	8,690,766,267	13.63
1102	Retribusi Daerah	10,382,977,000	9,851,572,691	(5.12)
1103	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1,040,807,041	1,084,306,177	4.18
1104	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	8,618,327,627	14,201,897,714	64.779
12	Pendapatan Transfer	291,683,014,868	290,768,832,107	(0.32)
121	Dana Perimbangan	287,043,014,868	283,656,384,152	(1.18)
12101	Bagi Hasil Pajak	17,179,391,000	17,066,141,971	(0.66)
12102	Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam	495,809,868	343,828,181	(30.65)
12103	Dana Alokasi Umum (DAU)	236,403,814,000	236,403,814,000	-
12104	Dana Alokasi Khusus (DAK)	32,964,000,000	29,842,600,000	(9.47)
122	Transfer Pemerintah Provinsi	4,650,000,000	7,112,447,955	52.96
13	Lain-Lain Pendapatan yang Sah	2,189,573,402	1,614,759,000	(38.69)
	Jumlah Pendapatan	321,573,402,536	326,212,067,289	1.44
2	Belanja	3,82,750,147,836	290,388,729,114	(24.13)
21	Belanja Operasi	284,214,565,500	221,413,019,890	(22.10)
2101	Belanja Pegawai	208,013,168,650	172,865,929,575	(16.90)
2102	Belanja Barang dan Jasa	58,712,346,850	41,830,139,909	(28.75)
2103	Belanja Hibah	4,909,000,000	670,000,000	(86.35)

2104	Belanja Bantuan Sosial	9,880,050,000	6,046,950,406	(38,80)
2105	Belanja Bantuan Keuangan	2,700,000,000	-	(100)
22	Belanja Modal	96,240,355,336	68,488,321,388	(28.84)
2201	Belanja Modal Tanah	4,800,000,000	-	(100)
2202	Belanja Peralatan dan Mesin	17,572,328,925	14,526,215,272	(17.33)
2203	Belanja Gedung dan Bangunan	44,220,409,530	28,416,941,035	(35.74)
2204	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	24,956,214,881	20,987,056,081	(15.90)
2205	Belanja Aset Tetap Lainnya	3,398,181,000	3,321,143,800	(4.35)
2206	Belanja Aset Lainnya	1,293,227,000	487,387,836	(78.77)
23	Belanja Tidak Terduga	2,295,227,000	487,387,836	(78.77)
	Jumlah Belanja	284,214,565,500	221,413,019,890	(22.10)
	Surplus / (Defisit)	(61,176,745,300)	35,823,729,114	(24.13)
3	Pembiayaan	61,176,745,300	61,400,059,389	0.37
31	Penerimaan Daerah	64,676,745,300	62,369,203,596	(3.57)
3101	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	61,523,745,300	61,430,955,890	(0.15)
3102	Penerimaan Piutang Daerah	1,653,000,000	928,647,706	(43.82)
32	Pengeluaran Daerah	3,500,000,000	969,144,207	(72.31)
3201	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3,000,000,000	862,903,823	(71.24)
3202	Pembayaran Pokok Utang	500,000,000	106,240,384	(78.75)
33	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Berkenaan	-	97,223,397,565	100

Pemerintah Kota Bukittinggi

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2009

Kode	Uraian	Jumlah (Rp.)		%
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	
1	Pendapatan Daerah	330,510,151,771	337,523,784,232	2,12
11	Pendapatan Asli Daerah	33,735,547,657	44,924,704,493	33,16
1101	Pajak Daerah	9,957,740,000	10,209,597,439	2.52
1102	Retribusi Daerah	12,984,141,371	10,011,148,755	(22.90)
1103	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1,374,582,277	1,374,582,277	0
1104	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	11,419,084,009	23.329,376,030	104,30
12	Dana Perimbangan	289,316,772,216	291,185,853,995	1,00
1201	Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak	16,097,615,216	17,966,696,995	11,61
1202	Dana Alokasi Umum (DAU)	236,106,157,000	236,106,157,000	0
1203	Dana Alokasi Khusus (DAK)	37,113,000,000	37,113,000,000	0
13	Lain-Lain Pendapatan yang Sah	7,457,831,898	8,610,225,744	15.46
1301	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah	4,650,000,000	7,218,502,990	55.22
1302	Bantuan Keuangan dari Provinsi / Pemerintah Daerah Lainnya	1,058,796,920	1,081,596,920	2.17
1303	Bantuan Keuangan dari Pemerintah	1.749.034.978	310.125.834	(82.27)
	Jumlah Pendapatan	330,510,151,771	337,523,784,232	2,12
2	Belanja Daerah	426,333,549,337	346,690,783,782	(18,69)
21	Belanja Tidak Langsung	244,449,120,439	206,462,890,621	(15.54)

2101	Belanja Pegawai	204,579,304,439	179,623,274,461	(12.20)
2102	Belanja Hibah	17,876,816,000	16,765,340,000	(6.22)
2103	Belanja Bantuan Sosial	15,093,000,000	8.802,134,988	(41.79)
2104	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Prov/Kab/Kota	4,400,000,000	300,000,000	(93.2)
2105	Belanja Tidak Terduga	2,500,000,000	972,141,172	(61.2)
22	Belanja Langsung	181,884,428,898	140,227,893,161	(22.91)
2201	Belanja Pegawai	34,447,208,500	26,030,221,758	(24.44)
2202	Belanja Barang dan Jasa	63,031,075,448	46,722,990,808	(25.88)
2203	Belanja Modal	84,406,144,950	67,474,680,595	(20.17)
	Jumlah Belanja	426,333,549,337	346,690,783,782	(18.69)
	Surplus / (Defisit)	(95,823,397,566)	(9,166,999,549)	100
3	Pembiayaan	95,823,397,566	99,626,676,238	(4.11)
31	Penerimaan Daerah	100,023,397,566	99,631,218,955	0
3101	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	97,223,397,566	97,223,259,195	0
3102	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1,300,000,000	10,800,000	(99)
3103	Penerimaan Piutang Daerah	1,500,000,000	2,397,159,760	60,23
32	Pengeluaran Daerah	4,200,000,000	4,542,717	(100)
3201	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3,700,000,000	-	(100)
3202	Pembayaran Pokok Utang	500,000,000	4,542,717	(99)
33	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Berkenaan	0,00	90,459,676,689	100

Pemerintah Kota Bukittinggi

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2010

Kode	Uraian	Jumlah (Rp.)		%
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	
1	Pendapatan Daerah	341,422,990,833	338,421,473,678	(0.91)
11	Pendapatan Asli Daerah	42,193,150,511	33,847,174,752	(19,8)
1101	Pajak Daerah	13,518,500,000	11,728,705,362	(13,2)
1102	Retribusi Daerah	12,933,515,675	12,609,831,129	(3,51)
1103	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1,773,664,928	1,829,523,928	3,15
1104	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	13,967,469,908	7,679,114,333	(45.03)
12	Dana Perimbangan	279,495,071,950	279,481,878,176	-
1201	Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak	19,001,331,950	18,988,138,176	-
1202	Dana Alokasi Umum (DAU)	242,306,440,000	242,306,440,000	-
1203	Dana Alokasi Khusus (DAK)	18,187,300,000	18,187,300,000	-
13	Lain-Lain Pendapatan yang Sah	19,734,768,372	25,092,420,750	27.15
1301	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah	3,100,000,000	9,110,622,360	293.8
1302	Bantuan Keuangan dari Provinsi / Pemerintah Daerah Lainnya	600,000,000	307,600,000	(48,9)
1303	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	16,034,768,372	15,674,198,390	(2,11)
	Jumlah Pendapatan	341,422,990,833	338,421,473,678	(0.91)
2	Belanja Daerah	433,240,982,933	363,236,193,806	(16.15)
21	Belanja Tidak Langsung	250,941,832,476	232,783,921,527	(7.23)

2101	Belanja Pegawai	216,582,568,767	209,549,305,264	(3.24)
2102	Belanja Hibah	13,284,778,000	8,897,878,673	(32.3)
2103	Belanja Bantuan Sosial	16,334,485,709	13,328,869,690	(18.4)
2104	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Prov/Kab/Kota	1.260,000,000	-	0
2105	Belanja Tidak Terduga	3,480,000,000	1,007,867,900	(71.1)
22	Belanja Langsung	182,299,150,457	130,452,272,279	(27.9)
2201	Belanja Pegawai	37,150,294,793	29,824,976,178	(19.7)
2202	Belanja Barang dan Jasa	73,268,757,277	52,709,480,286	(28.0)
2203	Belanja Modal	71,680,098,387	47,917,815,815	(32.8)
	Jumlah Belanja	433,240,982,933	363,236,193,806	(16.15)
	Surplus / (Defisit)	(91,817,992,100)	(24,814,720,127)	(73.11)
3	Pembiayaan	91,817,992,100	90,438,297,347	(0.01)
31	Penerimaan Daerah	92,959,676,600	90,458,297,347	(0.02)
3101	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	90,459,676,600	90,458,297,347	-
3102	Penerimaan Piutang Daerah	2,500,000,000	-	-
32	Pengeluaran Daerah	1,141,684,500	20,000,000	(98.2)
3201	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1,000,000,000	-	-
3202	Pembayaran Pokok Utang	141,684,500	20,000,000	(85.8)
33	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Berkenaan	-	65,623,577,219	-

Pemerintah Kota Bukittinggi

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2011

Kode	Uraian	Jumlah (Rp.)		%
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	
1	Pendapatan Daerah	406,051,172,188	401,417,194,463	0.08
11	Pendapatan Asli Daerah	45,023,938,692	49,253,418,058	9,39
1101	Pajak Daerah	17,168,500,000	17,461,926,058	1.73
1102	Retribusi Daerah	16,806,931,722	19,419,848,821	15.5
1103	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3,038,188,100	3,638,188,100	19.7
1104	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	8,010,318,870	8,733,455,069	9.38
12	Dana Perimbangan	307,380,094,536	305,965,314,648	(0.54)
1201	Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak	11,205,676,536	15,621,671,648	39.4
1202	Dana Alokasi Umum (DAU)	272,853,718,000	272,853,718,000	-
1203	Dana Alokasi Khusus (DAK)	23,320,700,000	17,489,925,000	(25.2)
13	Lain-Lain Pendapatan yang Sah	53,647,138,960	46,119,461,813	(15.7)
1301	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah	12,309,163,960	11,633,836,985	(5.53)
1302	Bantuan Keuangan dari Provinsi / Pemerintah Daerah Lainnya	589,200,000	589,200,000	-
1303	Pendapatan Hibah	-	26,136,000	100
1304	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	10,021,975,000	2,112,825,000	(78.9)
1305	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	30,726,800,000	30,866,473,463	0.05
	Jumlah Pendapatan	406,051,172,188	401,417,194,463	(1,14)

2	Belanja Daerah	469,253,354,207	405,420,576,374	(13.6)
21	Belanja Tidak Langsung	269,745,449,708	260,866,438,337	(3.37)
2101	Belanja Pegawai	242,758,810,024	243,442,955,461	0.03
2102	Belanja Hibah	12,539,044,400	5,978,878,028	(52.3)
2103	Belanja Bantuan Sosial Kepada Pemerintah Prov/Kab/Kota	13,249,196,140	10,916,510,148	(17.6)
2104	Belanja Tidak Terduga	1,938,399,144	528,094,700	(72.7)
22	Belanja Langsung	199,507,904,499	144,554,138,037	(27.5)
2201	Belanja Pegawai	42,280,654,478	33,546,024,904	(20.7)
2202	Belanja Barang dan Jasa	82,569,449,035	60,550,867,273	(26.7)
2203	Belanja Modal	74,657,800,986	50,457,245,860	(32.4)
	Jumlah Belanja	469,253,354,207	405,420,576,374	(13.6)
	Surplus / (Defisit)	(63,202,182,019)	(4,003,381,911)	100
3	Pembiayaan	63,202,182,019	63,310,978,879	0.2
31	Penerimaan Daerah	65,623,577,219	65,622,525,392	-
3101	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	65,623,577,219	65,622,525,392	-
32	Pengeluaran Daerah	2,421,395,200	2,311,546,513	(4.52)
3201	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2,113,000,000	2,112,546,513	-
3202	Pembayaran Pokok Utang	308,395,200	198,664,615	(35.6)
33	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Berkenaan	-	59,307,596,968	100

Pemerintah Kota Bukittinggi

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2012

Kode	Uraian	Jumlah (Rp.)		%
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	
1	Pendapatan Daerah	465,266,259,329	461,396,488,849	(0.83)
11	Pendapatan Asli Daerah	49,310,208,409	45,076,555,841	(8.59)
1101	Pajak Daerah	20,502,492,642	19,848,460,300	(3.19)
1102	Retribusi Daerah	17,279,641,811	14,748,993,711	(14.6)
1103	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3,248,073,956	2,892,369,763	(10.9)
1104	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	8,280,000,000	7,586,732,067	(8.4)
12	Dana Perimbangan	365,081,903,351	365,938,810,846	0.23
1201	Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak	18,280,327,351	24,281,551,846	32.8
1202	Dana Alokasi Umum (DAU)	326,224,306,000	326,224,306,000	-
1203	Dana Alokasi Khusus (DAK)	20,577,270,000	15,432,953,000	(25.1)
13	Lain-Lain Pendapatan yang Sah	50,874,147,569	50,381,122,162	(0.97)
1301	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah	11,874,147,569	10,381,122,162	(8.23)
1302	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	39,039,923,000	39,521,392,231	1.23
	Jumlah Pendapatan	465,266,259,329	461,396,488,849	(0.83)
2	Belanja Daerah	522,203,826,129	447,442,753,557	(14.4)
21	Belanja Tidak Langsung	310,499,295,539	289,830,843,899	(6.66)
2101	Belanja Pegawai	288,545,271,889	270,874,433,012	(6.12)

2102	Belanja Hibah	16,054,683,000	15,749,150,310	(1.90)
2103	Belanja Bantuan Sosial	3,046,140,000	1,968,440,000	(35,4)
2104	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Prov/Kab/Kota	551,521,298	551,521,298	-
2104	Belanja Tidak Terduga	2,301,679,352	687,299,279	(70.2)
22	Belanja Langsung	211,704,530,590	157,611,909,658	(25.6)
2201	Belanja Pegawai	45,537,278,200	37,427,444,376	(17.9)
2202	Belanja Barang dan Jasa	91,984,011,370	69,449,826,690	(24.5)
2203	Belanja Modal	74,183,241,020	50,734,638,592	(31.7)
	Jumlah Belanja	522,203,826,129	447,442,753,557	(14.4)
	Surplus / (Defisit)	(56,937,566,800)	13,953,735,291	100
3	Pembiayaan	56,937,566,800	56,937,566,800	-
31	Penerimaan Daerah	59,307,566,800	59,307,566,800	-
3101	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	59,307,566,800	59,307,566,800	-
32	Pengeluaran Daerah	2,370,000,000	2,370,000,000	-
3201	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2,370,000,000	2,370,000,000	-
33	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Berkenaan	-	70,891,302,091	100

Pemerintah Kota Bukittinggi

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2013

Kode	Uraian	Jumlah (Rp.)		%
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	
1	Pendapatan Daerah	538,696,842,640	527,475,062,408	(2.18)
11	Pendapatan Asli Daerah	54,646,355,950	55,203,591,605	1.02
1101	Pajak Daerah	24,182,218,901	22,560,666,814	(6.71)
1102	Retribusi Daerah	19,020,690,000	16,593,461,861	(12.8)
1103	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3,234,547,000	3,691,819,262	14.14
1104	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	8,208,900,000	12,357,643,668	50.54
12	Dana Perimbangan	418,375,949,090,	408,814,962,363	(2.29)
1201	Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak	20,250,694,090	18,143,222,363	(10.5)
1202	Dana Alokasi Umum (DAU)	368,311,195,000	368,311,195,000	-
1203	Dana Alokasi Khusus (DAK)	29,814,060,000	22,360,545,000	(25.0)
13	Lain-Lain Pendapatan yang Sah	65,674,537,600	63,456,508,440	(3.38)
1301	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah	12,191,866,000	12,218,976,000	0.22
1302	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	49,740,773,000	49,740,773,000	-
1303	Bantuan Keuangan dari Provinsi / Pemerintah Daerah Lainnya	3,741,898,600	1,496,759,440	(60.1)
	Jumlah Pendapatan	538,696,842,640	527,475,062,408	(2.18)
2	Belanja Daerah	590,656,144,731	504,110,258,149	(14.7)

21	Belanja Tidak Langsung	319,043,551,748	292,653,417,491	(8.27)
2101	Belanja Pegawai	306,652,090,450	284,139,179,620	(7,34)
2102	Belanja Hibah	5,028,090,450	4,406,252,136	(12.4)
2103	Belanja Bantuan Sosial	5,051,640,000	3,594,680,177	(28.9)
2104	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Prov/Kab/Kota	501,521,298	501,521,298	-
2104	Belanja Tidak Terduga	1,810,000,000	11,784,260	(99,3)
22	Belanja Langsung	271,612,592,983	211,456,840,658	(22.2)
2201	Belanja Pegawai	53,323,399,095	45,311,233,704	(15.1)
2202	Belanja Barang dan Jasa	118,900,843,652	89,852,281,671	(24.5)
2203	Belanja Modal	99,388,350,236	76,293,325,283	(23.3)
	Jumlah Belanja	590,656,144,731	504,110,258,149	(14.7)
	Surplus / (Defisit)	(51,656,144,731)	23,364,804,258	100
3	Pembiayaan	51,656,144,731	51,656,144,731	-
31	Penerimaan Daerah	70.891,302,091	70.891,302,091	-
3101	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	70.891,302,091	70.891,302,091	-
32	Pengeluaran Daerah	18,932,000,000	18,932,000,000	-
3201	Pembentukan Dana Cadangan	15,000,000,000	15,000,000,000	-
3202	Penyertaan Modal / Investasi Pemerintah Daerah	3,932,000,000	3,932,000,000	-
33	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Berkenaan	-	75,324,833,481	100

Pemerintah Kota Bukittinggi

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2014

Kode	Uraian	Jumlah (Rp.)		%
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	
1	Pendapatan Daerah	595,530,789,650	595,424,983,587	(0.02)
11	Pendapatan Asli Daerah	60,578,297,922	61,613,681,043	1.71
1101	Pajak Daerah	26,982,218,901	27,314,135,978	1.23
1102	Retribusi Daerah	20,500,506,821	18,043,436,304	(11.9)
1103	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3,452,740,700	3,452,740,700	-
1104	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	9,642,831,500	12,803,368,061	32.8
12	Dana Perimbangan	453,440,696,539	452,713,545,419	(0.02)
1201	Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak	16,006,279,539	15,279,128,419	(4.54)
1202	Dana Alokasi Umum (DAU)	404,285,567,000	404,285,567,000	-
1203	Dana Alokasi Khusus (DAK)	33,148,850,000	33,148,850,000	-
13	Lain-Lain Pendapatan yang Sah	81,511,795,189	81,097,757,125	(0.51)
1301	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah	17,677,717,189	17,263,679,125	(2.34)
1302	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	61,623,658,000	61,623,658,000	-
1303	Bantuan Keuangan dari Provinsi / Pemerintah Daerah Lainnya	2,210,420,000	2,210,420,000	-
	Jumlah Pendapatan	595,530,789,650	595,424,983,587	(0.02)
2	Belanja Daerah	641,272,623,131	542,050,414,973	(15.5)
21	Belanja Tidak Langsung	377,205,008,089	331,190,391,146	(12.2)

2101	Belanja Pegawai	336,743,703,072	301,399,665,287	(10.5)
2102	Belanja Hibah	32,707,554,237	24,873,204,750	(23.9)
2103	Belanja Bantuan Sosial	6,316,236,000	4,473,693,836	(29.2)
2104	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Prov/Kab/Kota	549,978,535	443,827,273	(19.3)
2104	Belanja Tidak Terduga	887,536,245	-	-
22	Belanja Langsung	264,067,615,041	210,860,023,827	(20.2)
2201	Belanja Pegawai	47,027,483,450	40,703,304,450	(13.5)
2202	Belanja Barang dan Jasa	116,356,184,134	93,605,168,741	(19.6)
2203	Belanja Modal	100,683,947,457	76,551,550,636	(23.9)
	Jumlah Belanja	641,272,623,131	542,050,414,973	(15.5)
	Surplus / (Defisit)	(45,741,833,481)	53,374,568,613	100
3	Pembiayaan	45,741,833,481	45,741,136,518	-
31	Penerimaan Daerah	75,324,833,481	75,324,136,518	-
3101	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	75,324,833,481	75,324,136,518	-
32	Pengeluaran Daerah	29,583,000,000	29,583,000,000	-
3201	Pembentukan Dana Cadangan	25,000,000,000	25,000,000,000	-
3202	Penyertaan Modal / Investasi Pemerintah Daerah	4,583,000,000	4,583,000,000	-
33	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Berkenaan	-	99,115,705,131	100